



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



LAPORAN KINERJA

DISUSUN OLEH:

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kutai Kartanegara

2025



**LAPORAN KINERJA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

Pengarah:

Ariyadi F, S.Ag.
(Kepala)

Penanggung Jawab:

Hj. Mariatul Kiptiah, S.Ag., M.M.
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

Editor:

Hj. Mariatul Kiptiah, S.Ag., M.M.
(Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

Penulis:

Pujo Satrianto, S.Kom.
Rahayu Ningsih

Kontributor:

Tim Penyusun Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara

Desain Grafis:

Rosnawati, S.Kom.

Produksi:

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dengan baik sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan atas pelaporan kegiatan dan kinerja di Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan organisasi yang bersih dan melayani.

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua perjanjian kinerja Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2025. Penyusunan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi atas kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara pada masa yang akan datang.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan sungguh sungguh dalam melaksanakan usaha yang maksimal untuk pencapaian setiap target yang ditetapkan.

Tenggarong, 27 Februari 2026
Kepala,



Ariyadi F, S.Ag.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan Tugas dan Fungsi.....	2
C. Aspek Strategis	3
D. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai	4
1. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.....	4
2. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
3. Keuangan	7
E. Sistematika Pelaporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	10
1. Visi	10
2. Misi.....	10
3. Tujuan	11
4. Sasaran Kegiatan	11
5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Analisis Capaian Kinerja.....	27
1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan.....	28
C. Realisasi Anggaran	106
D. Perbaikan Perencanaan Program.....	109
BAB IV PENUTUP	110
A. Faktor Peluang	111
B. Faktor Tantangan	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja	7
Tabel 2 Perjanjian Kinerja 2025.....	17
Tabel 3 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja.....	27
Tabel 4 Data Bimbingan Perkawinan	37
Tabel 5 Nilai Kinerja PAI 2025.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kankemenag Kukar	5
Gambar 2 Forum Group Discussion Deteksi Dini Konflik.....	29
Gambar 3 Pengembangan Early Warning System KUA	29
Gambar 4 MTQ ke XLVI Tingkat Kab. Kutai Kartanegara 2025.....	31
Gambar 5 Jadwal Pelaksanaan MTQ Kecamatan 2025	32
Gambar 6 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2025	33
Gambar 7 Penguatan Tata Kelola Lembaga	34
Gambar 8 Pelaksanaan PESPARAWI 2025.....	34
Gambar 9 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Agama Islam	36
Gambar 10 Pelaksanaan BRUS 2025	38
Gambar 11 Keluarga Sakinah	39
Gambar 12 Penyerahan Sarana Prasarana KUA	40
Gambar 13 Tangkapan Layar Rekapitulasi Nilai Penyuluh	42
Gambar 14 Rekapitulasi Laporan PAI Non ASN 2025.....	42
Gambar 15 Sertifikat Arah Kiblat Masjid dan Mushalla	45
Gambar 16 Penyaluran Penerima Bantuan	46
Gambar 17 Pengembangan UMKM	47
Gambar 18 Kordinasi Lintas Sektoral	48
Gambar 19 Pelatihan SIWAK 2025	50
Gambar 20 Penyerahan AIW.....	51
Gambar 21 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu	59
Gambar 22 Sertifikat Manasik Haji 2025	61
Gambar 23 Penyelenggaraan Manasik Haji Akbar 2025	62
Gambar 24 Wisuda Santri	62
Gambar 25 Pelantikan Forum Madrasah Inklusif.....	64
Gambar 26 Data Siswa Kelas 1 MI mengikuti PAUD.....	66
Gambar 27 Layanan Kesehatan pada Madrasah	66
Gambar 28 Data Santri Ula	70
Gambar 29 Pangkalan Data UM 2025.....	70
Gambar 30 Kegiatan Kepramukaan	72
Gambar 31 Hasil TKA Jenjang MA.....	73
Gambar 32 Kegiatan Keagamaan	74
Gambar 33 Penguatan Moderasi Beragama Santri.....	75
Gambar 34 Media Pembelajaran dengan Canva.....	76
Gambar 35 Data Akreditasi Madrasah.....	78
Gambar 36 Pendampingan Pondok Pesantren	80
Gambar 37 Pesantren Berdaya Berbasis Sumber Daya Ekonomi.....	81
Gambar 38 Pesantren Sumber Daya Ekonomi berkelanjutan	82
Gambar 39 Pesantren yang terdaftar di Kemenag dilakukan pengawasan dan pembinaan secara ketat.....	84
Gambar 40 Penanaman Nilai Religius.....	85
Gambar 41 Capaian IKPA pada myintress	87
Gambar 42 Penilaian pada Aplikasi PMPZI 2025.....	89
Gambar 43 Penilaian Pendahuluan oleh TIm TPP Kanwil Kemenag Prov Kaltim	89
Gambar 44 Pelaporan Kinerja pada SIPKA.....	90
Gambar 45 Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal	91
Gambar 46 Pelaporan Keuangan Semester 1&2 pada MONSAKTI	92
Gambar 47 Penyusunan RKBMN pada SIMAN.....	93

Gambar 48 Pelaporan E-PIPK.....	94
Gambar 49 Peta Jabatan 2025.....	95
Gambar 50 Peta Jabatan 2025.....	96
Gambar 51 Arsip Aktif pada Srikandi.....	99
Gambar 52 Struktur Organisasi PPID Kankemenag Kukar.....	101
Gambar 53 Tampilan Webstie PPID Kemenag Kukar	102
Gambar 54 Penguatan Kapasitas SDM PPID 2025.....	102
Gambar 55 Discounter Pemberitaan	104
Gambar 56 Konten Keagamaan dan Pendidikan 2025.....	105
Gambar 57 Peningkatan SDM Kehumasan 2025.....	106
Gambar 58 Statistik Realisasi Anggaran 2025	109
Gambar 59 Anggaran Per Jenis Belanja 2025	109

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan masyarakat yang rukun, cerdas, dan maslahat. Peran tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional, khususnya Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2025–2029.

Renstra Kementerian Agama Tahun 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, serta strategi Kementerian Agama dalam kurun waktu lima tahun, dengan fokus utama pada pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN.

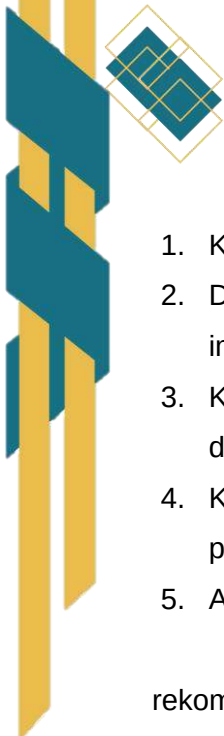
Selain itu, Renstra ini memberikan penekanan pada penguatan peran Kementerian Agama dalam mendukung visi besar pembangunan nasional, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam konteks tersebut, Kementerian Agama berkontribusi melalui pelaksanaan program-program di bidang pembangunan agama dan pendidikan keagamaan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama yang harmonis.

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menyajikan capaian kinerja yang ditinjau dari beberapa perspektif, antara lain pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), capaian kinerja lainnya, serta realisasi kinerja anggaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, nilai rerata capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap sasaran dan indikator pada tahun 2025 mencapai 100,76%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp94.842.757.064 atau 93,67% dari total pagu anggaran sebesar Rp101.248.130.000. Tingkat realisasi tersebut mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup efektif dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan.

Meskipun capaian kinerja dan realisasi anggaran tergolong baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

- 
1. Keterbatasan kompetensi teknis sumber daya manusia pada beberapa unit kerja.
 2. Dinamika kebijakan dan regulasi yang memerlukan penyesuaian cepat dalam implementasi program.
 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya pada layanan berbasis digital dan wilayah yang memiliki akses terbatas.
 4. Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan program secara terintegrasi.
 5. Adanya kendala teknis dalam penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, disusun beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.
2. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran agar lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan manajemen kinerja.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.
6. Mendorong inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2025. Dengan memperhatikan kendala yang ada serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah dirumuskan, diharapkan kinerja pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan nasional di bidang agama dan pendidikan keagamaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum memiliki arah dan kebijakan untuk memenuhi tuntutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai permasalahan, arah kebijakan, sasaran, tujuan, program dan kegiatan pokok dari berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan bidang agama. Renstra Kementerian Agama RI 2025-2029 disusun untuk menjawab tuntutan RPJMN 2025-2029 tersebut yang kemudian diturunkan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

Berdasarkan RPJPN 2025-2045 yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, kedudukan pembangunan fungsi pendidikan dan agama tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional di bawah payung pembangunan sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 merupakan upaya Kementerian Agama RI dalam mendukung pencapaian program pemerintah di sektor pembangunan agama dan pendidikan khususnya dalam penguatan SDM, penguatan reformasi birokrasi, dan penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dan toleran antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dalam lima tahun ke depan.

Rencana Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 ditindaklanjuti oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara secara terus menerus melalui upaya mengembangkan langkah-langkah, program strategis dan berbagai kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha, baik dalam kaitannya dengan penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat, penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang merata, penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil akan terus dilakukan guna menciptakan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Pembangunan infrastruktur layanan berbasis digital menjadi solusi dalam meningkatkan aksesibilitas serta kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan pendidikan yang keseluruhannya adalah dalam rangka mewujudkan kinerja pada

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2025, perlu disampaikan Laporan Tahunan yang berisi tentang pencapaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang diperoleh selama tahun 2025 tersebut.

Laporan Kinerja Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wujud pencapaian kinerja dari perencanaan strategis 2025-2029 dan perjanjian kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan kewajiban intansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan suatu keniscayaan yang harus diimplementasikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

B. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kementerian Agama RI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 550 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada tanggal 4 September 2025, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Perubahan regulasi ini menjadi tonggak penting dalam

reformasi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Substansi utama dari perubahan tersebut menegaskan adanya penataan ulang kewenangan kelembagaan guna memperkuat sistem pelayanan, pengawasan, serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Selanjutnya, pada tanggal 8 September 2025, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah. Peraturan Presiden ini secara resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian tersendiri yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang haji dan umrah.

Dengan berlakunya kedua regulasi tersebut, kewenangan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia resmi beralih kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Pengalihan kewenangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi pelayanan kepada jemaah, mulai dari tahap perencanaan, pembinaan, pelayanan, hingga perlindungan jemaah haji dan umrah.

Pembentukan kementerian khusus ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih terfokus, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan struktur organisasi yang lebih spesifik dan mandat yang terarah, diharapkan kualitas layanan kepada jemaah Indonesia dapat terus meningkat serta mampu menjawab tantangan penyelenggaraan haji dan umrah yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.

C. Aspek Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pasal 8, Kantor Kementerian Agama Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;

7. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program;
8. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

D. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai

1. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 550 terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggara Zakat dan Wakaf, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya dari masing-masing eselon 3 dan kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha;** bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.
- 2. Seksi Pendidikan Madrasah;** bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.
- 3. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;** bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Qur'an, dan pondok pesantren.

- KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUTAI KARTASULARA**

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022

```

graph TD
    A["Ariyadi F. S. Ag.  
197706051998031003  
Kepala Kantor"]
    B["Hj. Mariatuti Rijalah, S.Ag., M.M.  
197102221900032061  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha"]
    C["H. Eka Nurhidayah, S.Pd.I., M.Pd.  
198006072005012011  
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah"]
    D["Insa Rullyah, S.Pd.I., M.Pd.  
197409062005012007  
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Islam"]
    E["H. Fairuz Khalid, S.Ag., M.H.  
197911042006041001  
Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Islam"]
    F["Sudarto, S.T., M.Pd.I.  
197206112107031007  
Kepala Seksi Pendidikan Islam dan Pendidikan Inovatif"]
    G["H. Nurjahi, S.T., M.E.  
197607172006041014  
Kepala Seksi Pengembangan dan Inovasi"]
    H["Dr. Hj. Anniah, S.Ag., S.Pd.I., M.Pd.  
197008212006042001  
Pengembangan Zakat dan Wakaf"]

    A --- B
    A --- C
    A --- D
    A --- E
    A --- F
    A --- G
    A --- H
  
```



2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Keberadaan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas menjadi modal utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien.

Pencapaian kinerja tahun 2025 merupakan wujud nyata dari komitmen yang telah disepakati, dicanangkan, dan diterapkan secara konsekuen oleh seluruh jajaran, mulai dari tingkat administrator hingga pelaksana. Komitmen tersebut tercermin dalam sinergi kerja, peningkatan kinerja individu, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2025, jumlah pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 81 pegawai. Komposisi pegawai tersebut terdiri atas 7 pejabat struktural yang meliputi 1 pejabat eselon III dan 6 pejabat eselon IV, 48 pegawai fungsional tertentu, serta 33 pegawai pelaksana.

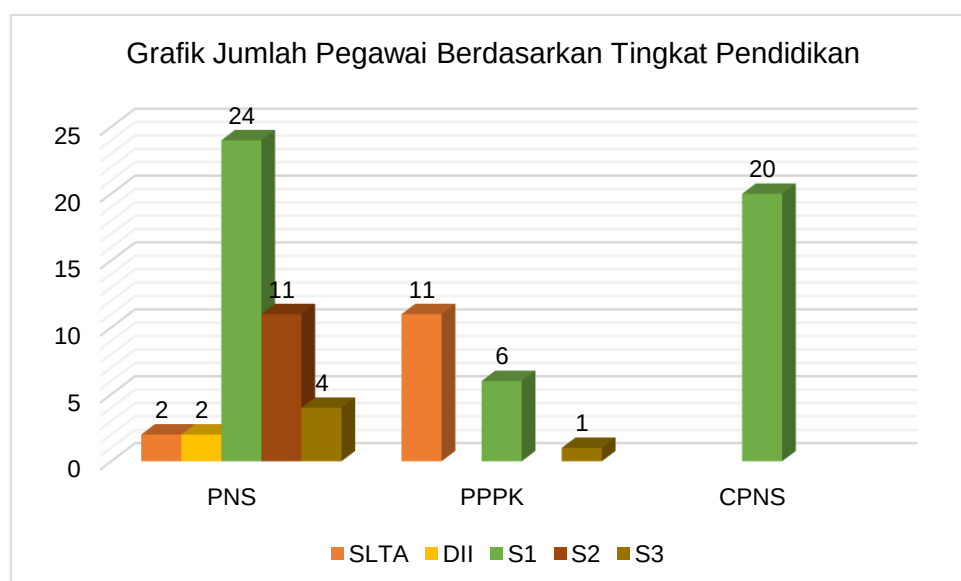
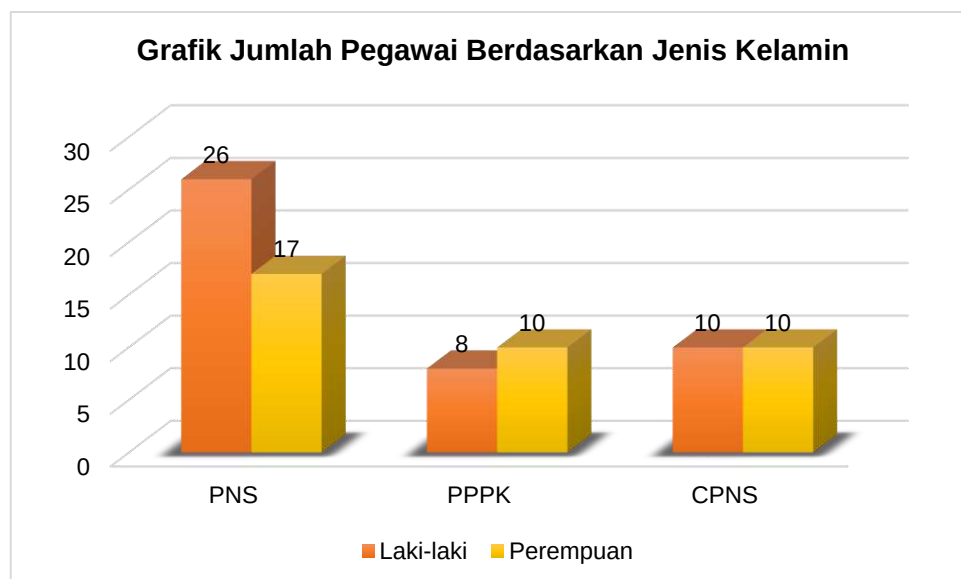
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia berada pada jabatan fungsional tertentu dan pelaksana yang berperan langsung dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan struktur organisasi yang berorientasi pada penguatan fungsi teknis dan operasional.

Adapun rincian jumlah pegawai dimaksud sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Unit Kerja	Jumlah	SLTA	D.II	S1/ D.IV	S2	S3
1	Kepala Kantor	1				1	
2	Sub Bagian Tata Usaha	29	5		23	1	
3	Seksi Pendidikan Madrasah	7	1	1	4	1	
4	Seksi Pendidikan Agama Islam	6			5	1	
5	Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	6			5	1	
6	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	6		1	4	1	
7	Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah	8	1		6	1	

8	Penyelenggara Zakat Wakaf	4			2	1	1
---	---------------------------	---	--	--	---	---	---

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja



3. Keuangan

Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp101.248.130.000 (seratus satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut merupakan sumber pendanaan utama dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berjalan.

Cakupan anggaran tersebut meliputi seluruh satuan kerja (satker) yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, serta termasuk dukungan pembiayaan yang bersumber dari hibah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada dana yang bersumber dari APBN, tetapi juga mengakomodasi kontribusi dari pemerintah daerah dalam rangka mendukung peningkatan layanan dan kinerja organisasi.

Dalam pelaksanaannya, anggaran dikelola secara terencana, sistematis, dan akuntabel melalui mekanisme pengendalian internal yang memadai. Proses pengelolaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang terintegrasi.

Selanjutnya, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan guna memastikan bahwa realisasi anggaran berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi capaian, kendala, serta langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Melalui pengelolaan anggaran yang baik, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara disusun secara sistematis dan terstruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Bagian awal laporan memuat Kata Pengantar dan Ikhtisar Eksekutif yang memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan program, perencanaan strategis, serta capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara secara ringkas selama tahun anggaran 2025.

Selanjutnya, isi laporan disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menyajikan latar belakang, kedudukan, tugas, dan fungsi, aspek strategi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bab II: Perencanaan Kinerja, menguraikan perencanaan strategis organisasi yang meliputi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Sasaran Kinerja Utama (IKU), Sasaran Kegiatan, dan rumusan Pengukuran

Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, termasuk analisis capaian kinerja, perbandingan target dan realisasi serta faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

Bab IV: Penutup, yang memuat kesimpulan Laporan Kinerja tentang keberhasilan dan kendala yang dihadapi, faktor pendukung maupun penghambat, faktor pendukung kinerja dan faktor tantangan, serta rencana perbaikan kinerja dimasa yang akan datang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan sistematika tersebut, Laporan Kinerja diharapkan mampu menyajikan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah dipahami, serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

1. Visi

Visi Kementerian Agama, yaitu: Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Terdapat tiga kata kunci di dalam visi Kementerian Agama, yaitu Rukun, Maslahat, dan cerdas. Adapun makna yang terkandung dari visi tersebut yakni :

1. Yang dimaksud “Rukun” adalah dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan.
2. Yang dimaksud “Beragama Maslahat” adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagaman yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.
3. Yang dimaksud “Cerdas” adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pendapaian visi cerdas dilakukan Kementerian Agama melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Kementerian Agama di atas, Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;



2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pesantren; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama, Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan keagamaan yang adil, mudah dan merata serta tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Tujuan

Untuk mencapai Misi Kementerian Agama, telah menetapkan lima tujuan sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama karena peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan secara merata, berkualitas, adil, dan inklusif;
3. Peningkatan akses pendidikan bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing kompetitif;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, melayani dan responsif.

4. Sasaran Kegiatan

Setiap sasaran program akan dicapai melalui implementasi kegiatan, sehingga sasaran kegiatan harus dipastikan mendukung pencapaian sasaran program. Tanpa dukungan sasaran kegiatan yang sesuai, sasaran program tidak akan dapat tercapai, yang pada akhirnya berdampak terhadap pencapaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

1. Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama;
2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam;
3. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
5. Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam;
6. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam;

7. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf;
8. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf;
9. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yang profesional, inklusif, dan berdampak;
10. Meningkatnya kualitas jemaah haji;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji;
12. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji;
13. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan;
14. Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas;
15. Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas;
16. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas;
17. Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah;
18. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren;
19. Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum;
20. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu;
21. Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu;
22. Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan;
23. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan;
24. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah;
25. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran;
26. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi;
27. Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran;
28. Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai);
29. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum;
30. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
31. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi.

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16.9
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam	Persentase peningkatan audiens MTQ	79
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	2
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	72
3	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	1
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	80
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam	10.01
		Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	10
		Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	10
		Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	25.35
		Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	98
5	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	98
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam	1:5
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	1
		Persentase peningkatan naskah & buku	1
		Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	10
7	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf	Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam terintegrasi basis data terpadu nasional	0.5
		Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	11
		Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti	4

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
8	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	15
		Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	2
		Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	6
		Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	5
9	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	90
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1:4
		Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan	60
10	Meningkatnya kualitas jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yg diberangkatkan sesuai kuota	5
11	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80
		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu	86
12	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase calon jemaah haji yg memperoleh sertifikat manasik haji	70
13	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	95
14	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	13
		Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	26
		Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	1
		Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	80
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80
15	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80
16	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	dan Pesantren yang berkualitas	Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	10
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80
		Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	95
17	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	20
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	80
18	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional	66.80
		Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	70.30
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	78.00
19	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	5
20	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase MI yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase MA yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5
21	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90
		Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	30
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	10

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	95
		Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	12.00
22	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	95
23	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	98
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	1
24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	7
25	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	90
26	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	98
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	98
		Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	98
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	98
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,83
27	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,10
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	99
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	98
		Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	99
28	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	80
		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	20
29	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	99
		Persentase rekomendasi izin orang asing	98
30	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	98
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	98
31	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	98
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	98
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	20

Tabel 2 Perjanjian Kinerja 2025

5. Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran capaian Sasaran Kegiatan dilakukan melalui penetapan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator ini merupakan indikator keluaran (output) yang secara langsung mencerminkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dalam rangka memastikan bahwa indikator yang ditetapkan dapat diukur secara objektif dan akuntabel, diperlukan rumusan pengukuran yang jelas dan terstruktur. Rumusan tersebut meliputi metode pengukuran, penanggung jawab indikator, sumber data, serta periode pelaporan. Dengan adanya rumusan ini, proses pengukuran kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penanggung jawab atas masing-masing indikator kinerja adalah pejabat Eselon IV pada setiap unit kerja, yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengendalian capaian kinerja. Sumber data yang digunakan dalam pengukuran indikator disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan, baik yang berasal dari laporan internal, aplikasi pendukung, maupun dokumen administrasi lainnya yang relevan.

Pengukuran dan pelaporan capaian kinerja dilakukan secara berkala sebanyak lima kali dalam satu tahun anggaran, yaitu pada setiap triwulan (Triwulan I sampai dengan Triwulan IV) serta laporan kinerja tahunan. Pola pelaporan ini bertujuan untuk memastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap progres capaian kinerja.

Indikator kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan disajikan dalam dua bentuk data, yaitu dalam bentuk persentase dan dalam bentuk numerik (angka, jumlah, nilai, dan sejenisnya). Namun demikian, untuk kepentingan analisis dan penyajian kinerja secara komprehensif, seluruh capaian indikator pada akhirnya dikonversi ke dalam bentuk persentase.

Penetapan capaian indikator dilakukan pada setiap periode pelaporan triwulanan, di mana nilai capaian tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase. Untuk indikator yang berbentuk persentase, pengukuran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{A_1}{A_0} \times 100\%$$

P = Presentase yang telah dicapai

A₁ = Angka yang dicapai

A₀ = Angka yang ditetapkan

Capaian akhir dari indikator yang ditetapkan berupa presentase dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$C = \frac{P}{TP} \times 100\%$$

C = Capaian Akhir

P = Presentase yang telah dicapai

TP = Target Presentase

Indikator yang targetnya ditetapkan dalam bentuk angka, jumlah, dan sejenisnya maka penghitungannya dilakukan berdasarkan jumlah/nilai dari indikator yang telah tercapai. Adapun untuk penghitungan capaian per triwulan dari indikator ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$C = \frac{A_1}{A_0} \times 100\%$$

C = Capaian Akhir

A₁ = Angka yang dicapai

A₀ = Angka yang ditetapkan

Rumus ini digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja, identifikasi kendala, serta perumusan langkah perbaikan pada periode berikutnya

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja tahunan merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis yang dijabarkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil (*result oriented*). Melalui perjanjian kinerja, setiap unit kerja memiliki komitmen yang jelas terhadap target kinerja yang harus dicapai, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan bentuk kesepakatan antara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur untuk periode satu tahun anggaran. Perjanjian ini memuat target kinerja yang harus dicapai serta menjadi dasar pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama tahun 2025. Dalam perjanjian kinerja tersebut, terdapat komitmen untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, perjanjian kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat kendali manajemen kinerja.

Sebagai dasar dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran organisasi, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Kedua indikator tersebut merupakan bagian integral dari sistem pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai capaian kinerja secara terukur, objektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya IKSP dan IKSK, pelaksanaan tugas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dipantau dan dievaluasi secara sistematis, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 tercermin dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pelaksanaan kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp 101.248.130.000,- (*seratus satu miliar dua ratus empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025, serta tambahan dukungan berupa bantuan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp2.366.145.000,- (*dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

Pemanfaatan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian, dalam implementasinya, keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan, tetapi juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan lain yang bersifat adaptif dan belum direncanakan pada awal tahun anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut turut memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan analisis capaian terhadap setiap indikator kinerja guna menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi pendukung keberhasilan, seperti efektivitas perencanaan, optimalisasi sumber daya, serta sinergi antar unit kerja.

Di sisi lain, analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan pada periode berikutnya. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi tidak hanya menggambarkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target, tetapi juga menjadi bahan evaluasi yang strategis dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

Dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis, dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam tabel capaian kinerja sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16.9	100	120%
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam	Persentase peningkatan audiens MTQ	79	79	100%
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	2	2	100%
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	72	72	100%
3	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	1	1	100%
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	80	40	50%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam	10.01	98	120%
		Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	10	10	100%
		Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	10	10	100%
		Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	25.35	94,44	120%
		Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	98	40,98	41,81%
5	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	98	100	102%
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam	1:5	1:3	120%
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	1	1	100%
		Persentase peningkatan naskah & buku	1	1	100%
		Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	10	10	100%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf	Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam terintegrasi basis data terpadu nasional	0.5	0.5	100%
		Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	11	11	100%
		Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti	4	0	100%
8	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	15	100	120%
		Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	2	2	100%
		Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	6	0	100%
		Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	5	5	100%
9	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	90	100	111,11%
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1:4	1:4	100%
		Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan	60	50	83,33%
10	Meningkatnya kualitas jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yg diberangkatkan sesuai kuota	5	5	100%
11	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80	80	100%
		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu	86	86	100%
12	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase calon jemaah haji yg memperoleh sertifikat manasik haji	70	100	120%
13	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	95	70	73,68%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
14	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	13	13	100%
		Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	26	26	100%
		Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	1	1	100%
		Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	80	100	120%
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80	100	120%
15	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1	1	100%
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80	80	100%
16	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1	1	100%
		Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	10	100	120%
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80	80	100%
		Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	95	100	105%
17	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80	80	100%
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80	100	120%
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	20	20	100%
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	80	100	120%
18	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional	66.80	44,53	66,66%
		Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	70.30	70.30	100%
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	78.00	78.00	100%
19	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	5	5	100%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
20	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	80	80	100%
		Persentase MI yang terakreditasi minimal B	80	80	100%
		Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	80	80	100%
		Persentase MA yang terakreditasi minimal B	80	80	100%
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5	5	100%
21	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90	100	111%
		Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	1	100%
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	30	30	100%
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	10	10	100%
		Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	95	95	100%
		Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	12.00	12.00	100%
22	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	95	100	105,26%
23	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80	44,53	66,66%
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	98	98	100%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	1	1	100%
24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95	95	100%
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	7	7	100%
25	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	90	93,97	104.40%
26	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98	100	102,04%
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	98	100	102,04%
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	98	80	81,63%
		Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	98	100	102,04%
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	98	100	102,04%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,83	3,83	100%
27	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,10	93,97	102,01%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	99	100	101%
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100%
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	98	100	102,04%
		Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	99	100	101%
28	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan,	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	80	100	100%

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
	penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	20	20	100%
29	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	99	99	100%
		Persentase rekomendasi izin orang asing	98	100	100%
30	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	98	100	102,04%
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	98	100	102,04%
31	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	98	100	102,04
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	98	100	102,04
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	20	369	120%

Tabel 3 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja

B. Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan menunjukkan capaian dengan nilai rata-rata dalam kategori baik. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang baik antara sumber daya manusia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dengan instansi terkait lainnya serta para pemangku kepentingan. Kolaborasi yang efektif tersebut menjadi faktor pendukung utama dalam memastikan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, berbagai upaya strategis juga telah dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja, antara lain melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Upaya-upaya tersebut berkontribusi dalam menjaga konsistensi pencapaian kinerja serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Meskipun demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan kinerja di masa mendatang, baik melalui penguatan kapasitas sumber

daya manusia maupun optimalisasi dukungan sarana dan prasarana. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai tingkat pencapaian kinerja, berikut disajikan analisis capaian kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan.

1. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 3 di atas dihasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,74%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Berdasarkan capaian kinerja ini dapat dilihat bahwa hampir seluruh indikator mencapai realisasi sebesar 100% dan terdapat beberapa indikator yang mencapai realisasi optimal sebesar 120%. Adapun capaian akhir dari setiap sasaran kegiatan dirincikan sebagai berikut :

1) Terlaksananya KUA Sebagai Pusat Cegah Konflik Agama

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 indikator, yaitu Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS mencapai 120%. Persentase KUA yang menyelenggarakan Early Warning System (EWS) merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai efektivitas upaya deteksi dini konflik sosial berdimensi keagamaan pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Indikator ini berorientasi pada keluaran (output) berupa terbentuknya sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi potensi konflik secara cepat dan tepat.

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan yang secara langsung mengintervensi indikator, yaitu melalui tiga kegiatan utama: (1) pembentukan tim pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan, (2) penguatan kapasitas melalui Forum Group Discussion (FGD), dan (3) pengembangan Early Warning System pada KUA.

Pertama, kegiatan pembuatan SK Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan telah dilaksanakan pada dua tingkatan, yaitu tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan. Pada tingkat kecamatan, seluruh KUA di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 18 KUA telah memiliki SK Tim. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan kelembagaan, seluruh KUA telah memiliki perangkat dasar dalam mendukung implementasi EWS. Capaian ini menjadi faktor utama yang mendorong tingginya nilai indikator karena mencerminkan kesiapan struktur organisasi di tingkat operasional.

Kedua, kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan dilaksanakan sebagai upaya

peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari 3 KUA dengan total 5 peserta yang terdiri dari Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam. Meskipun kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam deteksi dini konflik, namun cakupan peserta yang masih terbatas menunjukkan bahwa transfer pengetahuan belum merata ke seluruh KUA. Hal ini menjadi catatan penting dalam optimalisasi capaian indikator secara menyeluruh.



Gambar 2 Forum Group Discussion Deteksi Dini Konflik

Ketiga, kegiatan Pengembangan Early Warning System pada KUA Tahun 2025 diikuti oleh 8 KUA sebagai peserta. Kegiatan ini berfokus pada implementasi teknis dan penguatan sistem deteksi dini di tingkat KUA. Partisipasi sebagian KUA dalam kegiatan ini menunjukkan adanya tahapan implementasi yang belum menjangkau seluruh KUA, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam penerapan EWS antar wilayah.



Gambar 3 Pengembangan Early Warning System KUA

Berdasarkan keseluruhan pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS didukung kuat oleh pembentukan SK Tim yang telah menjangkau 100% KUA. Namun demikian, dari aspek kualitas implementasi, masih terdapat beberapa catatan penting, antara lain keterbatasan cakupan kegiatan penguatan kapasitas (FGD) dan pengembangan sistem yang belum melibatkan seluruh KUA.

Secara umum, capaian indikator ini dapat dikategorikan baik dari sisi kuantitas, namun masih memerlukan penguatan dari sisi kualitas implementasi. Risiko yang perlu diantisipasi adalah adanya kesenjangan pemahaman dan kesiapan antar KUA dalam mengoperasikan EWS secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan berupa pemerataan kegiatan peningkatan kapasitas, pendampingan berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi EWS dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di seluruh KUA di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2) Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam

Sasaran kegiatan ini diukur melalui tiga indikator kinerja terdiri dari 3 indikator, yaitu (1) Persentase peningkatan audiens MTQ mencapai 100% (2) Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam mencapai 100% (3) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dengan capaian rata-rata indikator sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa sasaran kegiatan ini telah sepenuhnya tercapai, yang sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, penguatan syiar keagamaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan secara berkelanjutan

(1) Persentase peningkatan audiens MTQ

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan audiens MTQ pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 79%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan MTQ ke-46 Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang

diselenggarakan di Kecamatan Tenggarong pada tanggal 23 s.d. 31 Oktober 2025. Kegiatan tersebut melibatkan 953 peserta yang terdiri dari 10 cabang, 29 golongan, 1 cabang ekshibisi, serta dilaksanakan pada 13 arena. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang diikuti oleh 908 peserta, terjadi peningkatan jumlah peserta sebesar $\pm 5\%$, yang secara langsung mencerminkan peningkatan audiens dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan MTQ.

Selain itu, peningkatan ini juga didukung oleh penyelenggaraan MTQ dan STQ di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh 20 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga memberikan efek berjenjang dalam mendorong partisipasi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi ketersediaan Dewan Hakim maupun peserta yang belum sepenuhnya memenuhi seluruh cabang dan golongan yang dimusabqahkan. Meskipun demikian, komitmen masing-masing kecamatan untuk tetap melaksanakan kegiatan MTQ menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa program peningkatan audiens MTQ telah terlaksana secara efektif, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pembinaan sumber daya untuk mendukung kualitas pelaksanaan di masa mendatang.



Gambar 4 MTQ ke XLVI Tingkat Kab. Kutai Kartanegara 2025

(2) Persentase peningkatan audiens MTQ

Capaian indikator kinerja persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat optimal dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian ini diperoleh melalui realisasi kegiatan yang secara langsung mengintervensi indikator, yaitu pelaksanaan MTQ/STQ tingkat kecamatan se-Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 20 kegiatan yang tersebar di seluruh kecamatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung secara merata sepanjang tahun 2025, dimulai dari bulan Juni hingga September, dengan partisipasi aktif masyarakat pada masing-masing wilayah.

Penyelenggaraan MTQ/STQ di tingkat kecamatan menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan jumlah peserta event seni budaya Islam, karena kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai media pembinaan dan syiar keagamaan yang menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan terselenggaranya kegiatan di 20 kecamatan, terjadi peningkatan akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah peserta secara keseluruhan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan ketersediaan peserta pada cabang dan golongan tertentu serta keterbatasan sumber daya pendukung di beberapa kecamatan. Namun demikian, komitmen pemerintah kecamatan dan dukungan masyarakat tetap mampu menjaga keberlangsungan kegiatan secara konsisten. Secara keseluruhan, capaian indikator ini mencerminkan bahwa program peningkatan partisipasi masyarakat dalam event seni budaya agama Islam telah berjalan efektif dan merata, serta berkontribusi positif dalam penguatan nilai-nilai keagamaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PELAKSANAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN		
Tenggarong Seberang 1 Juni - 7 Juni 2025	Tenggarong 16 Juni - 20 Juni 2025	Muara Jawa 21 Juni - 25 Juni 2025
Sangasanga 24 Juni - 27 Juni 2025	Loa Kulu 27 Juni - 30 Juni 2025	Samboja 28 Juni - 5 Juli 2025
Sebulu 26 Juni - 2 Juli 2025	Muara Badak 30 Juni - 4 Juli 2025	Samboja Barat 6 Juli - 10 Juli 2025
Anggana 6 Juli - 9 Juli 2025	Marangkayu 17 Juli - 20 Juli 2025	Muara Kaman 19 Juli - 23 Juli 2025
Loa Janan 25 Juli - 30 Juli 2025	Kota Bangun 23 Agustus - 30 Agustus 2025	Samboja 27 Agustus - 30 Agustus 2025
Kenohan 31 Agustus - 3 September 2025	Kembang Janggut 7 September - 13 September 2025	Muara Muntai 12 September - 17 September 2025
Kota Bangun Darat 11 September - 15 September 2025	Tabang 24 September - 28 September 2025	

Gambar 5 Jadwal Pelaksanaan MTQ Kecamatan 2025



Gambar 6 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 2025

ma

pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

Capaian indikator kinerja persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dengan tingkat capaian sebesar 100%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan yang secara langsung mengintervensi indikator, yaitu sebanyak 2 (dua) kegiatan pembinaan yang menyasar lembaga keagamaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kegiatan pertama berupa pemberian bantuan pembinaan kepada yayasan/lembaga keagamaan Islam, dalam hal ini kepada Badan Koordinasi Pendidikan Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia (BKPAKSI) Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp20.000.000,- yang dimanfaatkan untuk mendukung penguatan tata kelola kelembagaan dan operasional organisasi. Kegiatan kedua berupa kehadiran dan keterlibatan aktif dalam agenda pembinaan yang diselenggarakan oleh BKPAKSI, di mana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan sambutan sekaligus materi pembinaan dengan tema "Dari Al-Qur'an untuk Peradaban: Membina Generasi Unggul Melalui Moderasi Beragama dan Pendidikan Berkualitas".

Melalui kedua kegiatan tersebut, pendampingan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, wawasan keagamaan, serta tata kelola organisasi yang lebih baik. Meskipun jumlah kegiatan pembinaan relatif terbatas, namun pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas lembaga binaan. Ke depan, diperlukan perluasan jangkauan pembinaan kepada lebih banyak lembaga keagamaan agar dampak penguatan tata kelola dapat dirasakan secara lebih merata. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan kelembagaan telah dilaksanakan secara efektif sesuai target yang ditetapkan.



Gambar 7 Penguatan Tata Kelola Lembaga

3) Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama

Capaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik namun belum optimal. Sasaran kegiatan ini diukur melalui dua indikator, yaitu (1) Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama mencapai 100%, (2) Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola mencapai 50%. Dengan demikian, rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran ini sebesar 75%.

Capaian penuh pada indikator peningkatan peserta event seni budaya agama menunjukkan bahwa upaya penguatan harmoni sosial melalui pendekatan kultural dan partisipatif berjalan efektif, ditandai dengan tingginya keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan.



Gambar 8 Pelaksanaan PESPARAWI 2025

4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Sasaran ini terdiri dari 5 indikator, yaitu (1) Presentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam mencapai

120%, (2) Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah mencapai 100%, (3) Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah mencapai 100%, (4) Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana mencapai 120%, (5) Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi mencapai 41,81%.

(1) Presentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam

Capaian indikator kinerja persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 10,01%, realisasi capaian mencapai 120%, yang mencerminkan keberhasilan signifikan dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Realisasi ini ditunjukkan dengan jumlah peserta bimbingan yang mencapai 4.319 pasangan atau sebesar 97,69% dari total calon pengantin sepanjang tahun 2025. Capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 3.823 pasangan, sehingga menunjukkan adanya tren positif dalam perluasan jangkauan layanan bimbingan perkawinan.

Tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari strategi adaptif yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam mengatasi keterbatasan jumlah fasilitator. Pemanfaatan metode daring melalui platform Zoom Meeting menjadi solusi efektif untuk tetap menjangkau calon pengantin secara lebih luas tanpa terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia maupun faktor geografis. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya transformasi layanan berbasis digital yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan.

Namun demikian, masih terdapat sekitar 2,31% calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan perkawinan, yang mengindikasikan adanya kendala seperti keterbatasan akses jaringan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, atau keterbatasan waktu menjelang pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi sosialisasi, optimalisasi peran KUA, serta peningkatan kapasitas fasilitator agar cakupan layanan dapat mencapai 100% dan kualitas bimbingan tetap terjaga. Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan

kesiapan calon pengantin, sekaligus berkontribusi terhadap upaya membangun keluarga sakinah dan ketahanan keluarga di masyarakat.



Gambar 9 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Agama Islam

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Target Bimwin Mandiri		Catin Terbimbing		Sisa Target		Prosentasi	
			Jumlah	Anggaran (Dalam DIPA)	Jumlah	Anggaran	Jumlah	Anggaran	Jumlah Nikah	Jumlah Target
1	Anggana	243 Pasang	285 Pasang	Rp.0	236 Pasang	Rp11.800.000	49 Pasang	-Rp.11.800.000	97 %	83 %
2	Kembang Janggut	182 Pasang	178 Pasang	Rp.0	162 Pasang	Rp8.100.000	16 Pasang	-Rp.8.100.000	89 %	91 %
3	Kenohan	60 Pasang	60 Pasang	Rp.0	59 Pasang	Rp3.450.000	1 Pasang	-Rp.3.450.000	98 %	98 %
4	Kota Bangun	235 Pasang	270 Pasang	Rp.0	228 Pasang	Rp11.400.000	42 Pasang	-Rp.11.400.000	97 %	84 %
5	Loa Janan	366 Pasang	450 Pasang	Rp.0	386 Pasang	Rp19.300.000	64 Pasang	-Rp.19.300.000	105 %	86 %
6	Loa Kulu	306 Pasang	360 Pasang	Rp.0	302 Pasang	Rp15.100.000	58 Pasang	-Rp.15.100.000	99 %	84 %
7	Marang Kayu	170 Pasang	210 Pasang	Rp.0	163 Pasang	Rp8.150.000	47 Pasang	-Rp.8.150.000	96 %	78 %
8	Muara Badak	319 Pasang	270 Pasang	Rp.0	259 Pasang	Rp12.950.000	11 Pasang	-Rp.12.950.000	81 %	96 %
9	Muara Jawa	248 Pasang	210 Pasang	Rp.0	244 Pasang	Rp12.200.000	-34 Pasang	-Rp.12.200.000	98 %	116 %
10	Muara Kaman	263 Pasang	240 Pasang	Rp.0	254 Pasang	Rp12.700.000	-14 Pasang	-Rp.12.700.000	97 %	106 %
11	Muara Muntai	100 Pasang	119 Pasang	Rp.0	94 Pasang	Rp4.700.000	25 Pasang	-Rp.4.700.000	94 %	79 %

No	KUA Kecamatan	Jumlah Nikah	Target Bimwin Mandiri		Catin Terbimbing		Sisa Target		Prosentasi	
			Jumlah	Anggaran (Dalam DIPA)	Jumlah	Anggaran	Jumlah	Anggaran	Jumlah Nikah	Jumlah Target
12	Muara Wis	48 Pasang	45 Pasang	Rp.0	71 Pasang	Rp3.550.000	-26 Pasang	-Rp.3.550.000	148 %	158 %
13	Samboja	403 Pasang	435 Pasang	Rp.0	324 Pasang	Rp15.900.000	111 Pasang	-Rp.15.900.000	80 %	74 %
14	Sanga-sanga	118 Pasang	115 Pasang	Rp.0	113 Pasang	Rp5.650.000	2 Pasang	-Rp.5.650.000	96 %	98 %
15	Sebulu	273 Pasang	285 Pasang	Rp.0	250 Pasang	Rp12.500.000	35 Pasang	-Rp.12.500.000	92 %	88 %
16	Tabang	33 Pasang	30 Pasang	Rp.0	26 Pasang	Rp1.300.000	4 Pasang	-Rp.1.300.000	79 %	87 %
17	Tenggarong	630 Pasang	683 Pasang	Rp.0	729 Pasang	Rp36.450.000	-46 Pasang	-Rp.36.450.000	116 %	107 %
18	Tenggarong Seberang	424 Pasang	405 Pasang	Rp.0	419 Pasang	Rp20.950.000	-14 Pasang	-Rp.20.950.000	99 %	103 %
JUMLAH		4421 Pasang	4650 Pasang	Rp.0	4319 Pasang	Rp216.150.000	331 Pasang	-Rp.216.150.000	98 %	93 %

Tabel 4 Data Bimbingan Perkawinan

(2) Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah

Capaian indikator kinerja persentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dengan tingkat capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi capaian ini dihitung berdasarkan pelaksanaan 9 (sembilan) kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Loa Kulu, Muara Kaman, dan Tenggarong Seberang dengan total peserta sebanyak 326 orang. Kegiatan dilaksanakan secara merata di berbagai satuan pendidikan, mulai dari tingkat SMP, SMA, hingga madrasah, yang menunjukkan adanya perluasan jangkauan sasaran program secara cukup efektif.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh sinergi yang baik antara KUA dengan pihak sekolah dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan, serta meningkatnya kesadaran lembaga pendidikan terhadap pentingnya pembekalan pengetahuan pra nikah bagi remaja. Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan yang berbasis sekolah terbukti mampu menjangkau peserta secara langsung dan lebih terarah sesuai dengan kelompok sasaran.

Namun demikian, dari sisi pemerataan wilayah, pelaksanaan kegiatan masih terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan akses bagi remaja di wilayah lain. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi perluasan cakupan program secara

lebih merata di seluruh kecamatan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar keberlanjutan program BRUS dapat memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kesiapan remaja menuju kehidupan berkeluarga yang matang dan berkualitas.



Gambar 10 Pelaksanaan BRUS 2025

(3) Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah

Capaian indikator kinerja persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga sakinah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dengan tingkat capaian sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Layanan Keluarga Sakinah pada KUA piloting revitalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan oleh KUA Loa Janan, KUA Samboja, dan KUA Tenggarong Seberang dengan dukungan anggaran sebesar Rp 22.500.000,-. Kegiatan dilaksanakan melalui empat sub layanan utama yaitu Berkah Keuangan Keluarga, Berkah Membangun Relasi Harmonis, Layanan Konsultasi dan Pendampingan, serta Pengelolaan Jejaring Lokal dan Koordinasi Lintas Lembaga. Dari sisi partisipasi, KUA Loa Janan menjangkau 118 peserta, KUA Samboja 30 peserta, dan KUA Tenggarong Seberang 20 peserta pada masing-masing sub kegiatan, yang menunjukkan bahwa intervensi program telah menjangkau sasaran secara terstruktur dan berulang.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh implementasi model layanan terpadu berbasis KUA revitalisasi yang tidak hanya berfokus pada penyuluhan, tetapi juga mencakup aspek konsultasi, pendampingan, serta penguatan jejaring lintas sektor. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pemahaman keluarga dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berketahanan. Namun demikian, terdapat indikasi ketimpangan distribusi peserta antar KUA yang cukup signifikan, di mana dominasi peserta berada pada KUA Loa Janan, sehingga ke depan

(4) Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana

Pencapaian yang melampaui target menunjukkan adanya efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta responsivitas terhadap kebutuhan prioritas sarana prasarana di tingkat KUA. Namun demikian, capaian ini juga mengindikasikan perlunya penguatan perencanaan berbasis



kebutuhan riil (*need-based planning*) agar distribusi pemenuhan sarana prasarana dapat lebih merata pada seluruh KUA. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kondisi sarana prasarana yang telah disediakan guna memastikan keberlanjutan fungsi dan kualitasnya, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan output, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 12 Penyerahan Sarana Prasarana KUA

(5) Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi

Capaian indikator kinerja persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal, dengan realisasi sebesar 40,98% atau sebanyak 9 (sembilan) orang penghulu dari total 22 penghulu yang ada, dibandingkan dengan target sebesar 98%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 41,81%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi, yang mencerminkan masih terbatasnya penghulu yang memiliki sertifikasi kompetensi baik dalam bentuk sertifikat kenaikan jenjang maupun sertifikat fasilitator bimbingan perkawinan (Binwin/BRUS dan lainnya). Meskipun sebagian penghulu telah memiliki sertifikat, namun belum merata di seluruh SDM penghulu yang ada, sehingga berdampak pada belum optimalnya standar kompetensi layanan kepenghuluan. Faktor penyebab yang dapat diidentifikasi antara lain terbatasnya akses dan kesempatan mengikuti uji kompetensi atau pelatihan sertifikasi, belum terencana secara sistematisnya pengembangan kompetensi penghulu, serta kemungkinan adanya kendala administratif dan teknis dalam proses sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyusunan roadmap peningkatan kompetensi penghulu, penguatan koordinasi dengan unit pembina teknis, serta peningkatan fasilitasi pelatihan dan sertifikasi secara bertahap dan berkelanjutan agar target indikator dapat tercapai secara optimal pada periode

berikutnya sekaligus meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat.

5) Meningkatkan Kualitas Penyuluhan Agama Islam

Sasaran ini terdiri dari 2 indikator, yaitu (1) Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) mencapai 102%, (2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam mencapai 120%.

(1) Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

Indikator kinerja Persentase Penyuluh Agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (laporan harian, konten digital, dan kediklatan) menunjukkan capaian yang sangat optimal. Target yang ditetapkan sebesar 98%, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 102%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Penyuluh Agama Islam Non ASN telah memenuhi kriteria penilaian kinerja dengan kategori baik. Penilaian kinerja tahun 2025 dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu kehadiran dalam melaksanakan tugas di KUA dengan bobot 20% dan pelaksanaan tugas kepenyuluhan dengan frekuensi minimal 8 kali tatap muka per bulan dengan bobot 80%.

Berdasarkan hasil penilaian bulanan, mayoritas penyuluh menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik, dengan nilai yang stabil dan mendekati maksimal. Secara kumulatif, rata-rata nilai kinerja mencapai 98,40%, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas kepenyuluhan berjalan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Adapun nilai kinerja pada bulan Desember tercatat 0% disebabkan oleh perubahan status seluruh Penyuluh Agama Islam Non ASN yang telah diangkat menjadi PPPK, sehingga tidak lagi dilakukan penilaian dalam mekanisme sebelumnya. Hal ini bersifat administratif dan tidak mencerminkan penurunan kinerja.

Dengan demikian, indikator ini dinilai berhasil tercapai dengan kategori sangat baik (*over achievement*). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat kedisiplinan, konsistensi pelaksanaan kegiatan penyuluhan, serta optimalisasi pelaporan dan pemanfaatan media digital oleh para penyuluh.

NO	BULAN	NILAI KINERJA	KETERANGAN
1	Januari	100,00	
2	Februari	100,00	
3	Maret	98,13	
4	April	95,79	
5	Mei	98,23	
6	Juni	100,00	
7	Juli	100,00	
8	Agustus	99,72	
9	September	95,28	
10	Oktober	95,28	
11	Nopember	100,00	
12	Desember	0	Seluruh PAI telah diangkat sebagai PPPK
Jumlah Nilai Kinerja		98,40	

Tabel 5 Nilai Kinerja PAI 2025

Gambar 13 Tangkapan Layar Rekapitulasi Nilai Penuluh

NO	BULAN	NILAI KINERJA
1	JANUARI	100.00
2	FEBRUARI	100.00
3	MARET	98.13
4	APRIL	95.79
5	MEI	98.23
6	JUNI	100.00
7	JULI	100.00
8	AGUSTUS	99.72
9	SEPTEMBER	95.28
10	OKTOBER	95.28
11	NOPEMBER	100.00
12	DESEMBER	0
Jumlah Nilai Kinerja		98.40

Gambar 14 Rekapitulasi Laporan PAI Non ASN 2025

- (2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam

Indikator kinerja Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama Islam pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal. Target yang ditetapkan sebesar 1:5, sedangkan realisasi yang dicapai adalah 1:3, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 120%. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah kelompok sasaran yang dibina oleh setiap penyuluh lebih sedikit dari target, sehingga intensitas, kualitas, dan efektivitas pembinaan menjadi lebih tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi peran penyuluh agama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan secara terjadwal dan berkelanjutan, serta meningkatnya komitmen dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencapai target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya, yang berdampak pada peningkatan kualitas pembinaan dan pemahaman keagamaan masyarakat secara lebih mendalam dan merata.

6) Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam

Sasaran ini terdiri dari 3 indikator, yaitu (1) Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan mencapai 100%, (2) Persentase peningkatan naskah & buku mencapai 120%, (3) Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat mencapai 100%.

- (1) Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan

Indikator kinerja Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program peningkatan kitab suci dilaksanakan melalui kegiatan pendistribusian bantuan Kitab Suci Al-Qur'an oleh Seksi Bimas Islam kepada pengurus mushalla, dengan jumlah total sebanyak 10 mushaf yang telah disalurkan. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap kitab suci, serta berkontribusi dalam memperkuat pembinaan keagamaan di lingkungan mushalla.

(2) Persentase peningkatan naskah & buku

Indikator kinerja Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Program peningkatan buku keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan pendistribusian bantuan buku-buku keagamaan oleh Seksi Bimas Islam kepada perpustakaan madrasah, dengan jumlah total sebanyak 36 buku yang telah disalurkan. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian indikator ini mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan literasi keagamaan serta memperkuat sumber belajar di lingkungan madrasah.

(3) Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat

Indikator kinerja Persentase peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan meliputi layanan hisab rukyat berupa rukyatul hilal 1 Ramadhan 1446 H dan 1 Syawal 1446 H, serta layanan pengukuran arah kiblat dan alih fungsi mushalla menjadi masjid berdasarkan permohonan masyarakat. Sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 5 kegiatan yang terdiri dari 2 kegiatan kalibrasi/pengukuran arah kiblat dan 3 kegiatan alih fungsi mushalla menjadi masjid. Berdasarkan target yang ditetapkan sebanyak 10 kegiatan dan realisasi yang juga mencapai 10 kegiatan, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa layanan syariah dan hisab rukyat telah berjalan efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas layanan keagamaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- a. Pada tanggal 09 Januari 2025 telah dilaksanakan pengukuran arah kiblat pada Masjid Fasthabiqul Khairat Jl. Tennis Lapangan RT. 13 Kel. Panji, Kec. Tenggarong
- b. Pada tanggal 13 Februari 2025 telah dilaksanakan pengukuran arah kiblat pada Mushalla Mi'rojul M'minin Jl. Selendreng RT. 06 Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong



Gambar 15 Sertifikat Arah Kiblat Masjid dan Mushalla

7) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator, yaitu (1) Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam terintegrasi basis data terpadu nasional mencapai 100%, (2) Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan mencapai 100%.

- (1) Persentase jumlah mustahik Zakat/calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional

Capaian Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dalam basis data terpadu nasional pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, dengan target 0,5 dan realisasi 0,5 sehingga target kinerja telah tercapai secara optimal. Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana zakat telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan didukung oleh integrasi data mustahik dengan basis data terpadu nasional, sehingga meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Penyaluran dilakukan secara bertahap sepanjang tahun dengan mengacu pada hasil verifikasi lapangan serta usulan dari berbagai sumber, sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, peningkatan kualitas tata kelola penyaluran zakat dan dana sosial keagamaan, pengurangan potensi tumpang tindih bantuan sosial, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan wakaf. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain proses sinkronisasi data yang memerlukan waktu dan verifikasi berlapis, perbedaan pembaruan data antar lembaga, keterbatasan pemahaman teknis pengelola dalam pemanfaatan data terpadu, serta beragamnya sumber data mustahik yang memerlukan validasi tambahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi lintas lembaga,

penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem integrasi data guna mendukung keberlanjutan dan efektivitas program pada periode selanjutnya.



Gambar 16 Penyaluran Penerima Bantuan

- (2) Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan kolaborasi antara pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Tahun 2025. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi program percepatan sertifikasi lahan wakaf melalui kerja sama dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Kutai Kartanegara serta program pengembangan UMKM berbasis wakaf produktif. Program pengembangan UMKM telah direalisasikan melalui penyaluran bantuan modal usaha sebesar Rp10.000.000 per penerima manfaat guna meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan realisasi tersebut, capaian indikator kinerja Persentase Kolaborasi Program Pendayagunaan Zakat dan Pengembangan Wakaf mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi antar pemangku kepentingan serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial keagamaan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf produktif serta perlunya pendampingan lanjutan bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan legalitas aset wakaf guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi program di masa mendatang.



Gambar 176 Pengembangan UMKM

8) Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 3 indikator, yaitu (1) Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional mencapai 120%, (2) Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional mencapai 100%, (3) Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan mencapai.

(1) Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan professional

Pada capaian indikator ini telah dilakukan monitoring, koordinasi, dan pembinaan terhadap 4 lembaga zakat resmi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiganya menunjukkan kesesuaian dalam aspek:

- a. Kepatuhan terhadap regulasi syariah dan peraturan perundang-undangan zakat
- b. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan dan transparansi penggunaan dana
- c. Profesionalitas kelembagaan dalam perencanaan program, distribusi zakat, serta manajemen organisasi

Keempat lembaga tersebut telah melaporkan aktivitasnya secara berkala kepada Kementerian Agama dan berpartisipasi aktif dalam forum koordinasi zakat daerah. Pelaksanaan monitoring, koordinasi, dan pembinaan terhadap lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola dan profesionalitas lembaga. Kegiatan ini mendorong lembaga zakat untuk semakin patuh terhadap regulasi syariah dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Meskipun secara umum profesionalitas lembaga zakat menunjukkan perkembangan yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah belum seluruh lembaga zakat memiliki sistem digital manajemen zakat yang terintegrasi secara penuh, sehingga proses pelaporan dan monitoring masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Di samping itu, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguasaan tata kelola zakat modern, pelaporan berbasis teknologi informasi, serta manajemen organisasi yang profesional. Keterbatasan jumlah amil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya standarisasi pelayanan dan pengelolaan zakat yang lebih optimal.



Gambar 187 Kordinasi Lintas Sektoral

(2) Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam syariah Islam yang memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi umat dan pengembangan kesejahteraan sosial. Agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan data yang akurat, tertib, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pemerintah.

Kementerian Agama telah menghadirkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) sebagai aplikasi berbasis digital yang berfungsi untuk mendokumentasikan, mengelola, dan memantau seluruh data terkait tanah maupun aset wakaf di Indonesia. Melalui SIWAK, diharapkan data wakaf dapat tercatat secara valid, transparan, serta terintegrasi di tingkat pusat dan daerah.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala di lapangan, di antaranya:

- Belum meratanya pemahaman operator KUA dalam mengoperasikan aplikasi SIWAK.
- Kurangnya keterampilan teknis dalam melakukan input data, verifikasi, dan pembaruan informasi wakaf.
- Belum adanya penyamaan persepsi antara operator KUA dan penyuluh agama terkait peran serta tanggung jawab dalam pengelolaan data wakaf.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Pelatihan SIWAK bagi para operator KUA se-Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data wakaf secara digital, memperkuat sinergi antara operator dan penyuluh, serta mendorong terciptanya layanan administrasi wakaf yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para operator dalam mengelola dan menginput data wakaf melalui aplikasi SIWAK secara lebih akurat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menariknya, tidak hanya para operator KUA yang hadir, tetapi sejumlah penyuluh agama juga ikut serta dalam kegiatan ini. Kehadiran para penyuluh semakin memperkaya proses diskusi dan praktik penggunaan aplikasi, sehingga diharapkan kolaborasi antara operator dan penyuluh dapat memperkuat layanan administrasi dan pembinaan wakaf di tingkat kecamatan. Melalui pelatihan ini, peserta mendapatkan pemahaman teknis mulai dari proses pendaftaran tanah wakaf, input data nadzir, pengelolaan aset wakaf, hingga penyusunan laporan berbasis sistem. Dengan adanya pelatihan SIWAK ini, diharapkan kualitas layanan administrasi wakaf di Kabupaten Kutai Kartanegara semakin meningkat, transparan, dan memberikan manfaat lebih luas bagi Masyarakat.

Secara keseluruhan, pelatihan SIWAK berhasil meningkatkan kompetensi peserta, baik dari sisi teknis maupun pemahaman fungsional aplikasi. Keberhasilan semua peserta dalam membuat akun dan mengoperasikan sistem menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dan berdampak positif. Dengan hasil ini, ke depan KUA di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksikan mampu mengoptimalkan layanan administrasi wakaf secara digital, transparan, dan profesional



Gambar 19 Pelatihan SIWAK 2025

(3) Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

Akta Ikrar Wakaf (AIW) merupakan dokumen legal yang memiliki kekuatan hukum sebagai bukti sah terjadinya perbuatan wakaf serta menjadi dasar dalam menjamin kepastian hukum, sertifikasi tanah wakaf, dan tertib administrasi pengelolaan aset wakaf. Pada Tahun 2025, capaian indikator Persentase Akta Ikrar Wakaf yang Diterbitkan telah mencapai 100%, dimana seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan substantif berhasil diproses dan diterbitkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pelayanan dilaksanakan melalui tahapan verifikasi dan validasi dokumen secara cermat serta pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dukungan koordinasi yang baik antara wakif, nadzir, dan instansi terkait, sehingga tidak terdapat permohonan yang tertunda. Keberhasilan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan tertib administrasi wakaf, kepastian hukum atas harta benda wakaf, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, sekaligus mendukung proses lanjutan seperti sertifikasi tanah wakaf dan pengamanan aset guna meminimalkan potensi sengketa. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kelengkapan berkas permohonan yang belum optimal, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur, keterbatasan waktu para pihak, kebutuhan koordinasi lintas instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi, penyusunan panduan layanan yang lebih jelas, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, capaian kinerja ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam memberikan pelayanan yang

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum serta mendukung terwujudnya tata kelola wakaf yang tertib, aman, dan berkelanjutan.



Gambar 20 Penyerahan AIW

9) Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 3 indikator, yaitu (1) Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan) mencapai 111,11%, (2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama mencapai 100%, (3) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan mencapai 83,33%.

(1) Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

Capaian kinerja pada indikator Penyuluh Agama yang Memperoleh Nilai Kinerja Berkategori Baik dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang secara langsung mengintervensi indikator tersebut dengan mengacu pada hasil Penilaian E-Kinerja SKP Tahun 2025. Penilaian ini merupakan instrumen resmi yang digunakan untuk mengukur kinerja aparatur secara objektif, terukur, dan berbasis pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Target capaian yang ditetapkan adalah seluruh penyuluh agama memperoleh nilai kinerja minimal dalam kategori “Baik”. Target ini bersifat kuantitatif berbasis persentase, yaitu 100% penyuluh agama yang berada dalam pembinaan memperoleh hasil penilaian sesuai standar kinerja yang telah ditentukan dalam sistem E-Kinerja SKP. Target tersebut dirumuskan sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas layanan penyuluhan agama yang profesional, terukur, dan akuntabel.

Berdasarkan Laporan Penilaian E-Kinerja SKP Tahun 2025, seluruh penyuluh agama telah memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik. Dengan demikian, capaian indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh agama, baik dalam aspek pembinaan, penyuluhan, konsultasi keagamaan, maupun pendampingan masyarakat, telah berjalan secara optimal, terdokumentasi dengan baik, serta sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Ketercapaian ini mencerminkan komitmen, disiplin, dan profesionalitas penyuluh agama dalam menjalankan peran strategisnya di tengah masyarakat. Konsistensi dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), ketepatan waktu pelaporan, serta kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan pencapaian indikator ini.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas di lapangan masih terdapat hambatan struktural yang mempengaruhi optimalisasi layanan penyuluhan secara merata di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara. Beberapa kecamatan hingga saat ini belum memiliki penyuluh agama ASN secara definitif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemerataan layanan pembinaan dan penyuluhan keagamaan di seluruh wilayah.

Selain itu, penghentian atau tidak diperpanjangnya penugasan penyuluh agama non-ASN yang sebelumnya membantu di beberapa kecamatan turut mempengaruhi jangkauan pelayanan. Pada periode sebelumnya, penyuluh non-ASN berperan signifikan dalam menjangkau wilayah-wilayah yang belum terisi penyuluh ASN. Dengan berkurangnya tenaga pendukung tersebut, beban pelayanan menjadi lebih terpusat pada penyuluh ASN yang ada, sehingga beberapa penyuluh harus merangkap lebih dari satu wilayah binaan.

Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas dan memiliki karakteristik wilayah yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin frekuensi pembinaan yang merata. Akibatnya, meskipun secara kualitas individu penyuluh mampu memenuhi standar kategori baik, distribusi layanan secara kuantitatif di seluruh wilayah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kinerja, mulai diintensifkan penggunaan sistem pelaporan digital melalui E-Pakris (E-Penyuluh Agama Kristen). Sistem ini dirancang untuk

memastikan bahwa seluruh aktivitas penyuluhan terdokumentasi secara real-time, terukur, dan terdigitalisasi dengan baik. Melalui E-Pakris, laporan kegiatan, jumlah kelompok binaan, frekuensi pembinaan, serta dokumentasi kegiatan dapat tercatat secara sistematis dan dapat dipantau secara berjenjang. Intensifikasi pelaporan digital ini bertujuan untuk:

- ✓ Meningkatkan akurasi dan transparansi data kinerja penyuluh agama.
- ✓ Mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam pelaporan manual.
- ✓ Mempercepat proses monitoring dan evaluasi kinerja.
- ✓ Mendorong budaya kerja profesional berbasis teknologi dan data.

Meskipun pada tahap awal terdapat tantangan adaptasi terhadap sistem digital, seperti peningkatan literasi teknologi dan penyesuaian mekanisme pelaporan, secara bertahap sistem ini mampu memperkuat kualitas dokumentasi kinerja dan menjadi instrumen pendukung dalam mempertahankan capaian kategori baik bagi seluruh penyuluh agama. Untuk mengatasi hambatan yang ada, telah dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain:

- ✓ Optimalisasi pembagian wilayah binaan agar lebih proporsional sesuai jumlah penyuluh yang tersedia.
- ✓ Pemanfaatan metode pembinaan daring atau hybrid untuk menjangkau wilayah yang belum terisi penyuluh tetap.
- ✓ Penguatan koordinasi dengan tokoh agama dan lembaga keagamaan setempat guna menjaga kesinambungan pembinaan.
- ✓ Peningkatan kapasitas penyuluh dalam penggunaan sistem E-Kinerja dan E-Pakris melalui pendampingan teknis.
- ✓ Penyampaian usulan kebutuhan formasi penyuluh agama ASN sebagai bagian dari perencanaan SDM ke depan.

Dengan berbagai upaya tersebut, meskipun terdapat keterbatasan dalam pemerataan penempatan penyuluh, mutu kinerja individu tetap terjaga dan terukur secara digital. Hal ini dibuktikan dengan capaian 100% penyuluh agama memperoleh nilai kinerja berkategori baik pada Tahun 2025. Ke depan, penguatan sistem pelaporan digital melalui E-Pakris serta penataan distribusi penyuluh agama menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan profesionalitas, akuntabilitas, dan pemerataan layanan penyuluhan agama di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara

- (2) Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama

Capaian kinerja pada indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator tersebut pada Tahun 2025. Indikator rasio ini pada dasarnya digunakan untuk mengukur keterjangkauan layanan penyuluhan, yaitu sejauh mana penyuluh agama mampu memastikan adanya kelompok sasaran binaan yang menerima bimbingan agama secara aktif. Dengan kata lain, indikator ini tidak sekadar menilai “ada atau tidaknya kegiatan”, tetapi menilai keterpenuhan minimal pembinaan kelompok sasaran oleh setiap penyuluh dalam periode kinerja tertentu. Target rasio yang ditetapkan sebesar 1:4 menggambarkan standar layanan minimal yang harus dipenuhi, yakni setiap satu orang penyuluh agama diharapkan membina sedikitnya empat kelompok sasaran secara terencana dan berkelanjutan. Rasio ini sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan beban kerja penyuluh, memastikan pelayanan tidak terpusat pada kelompok tertentu saja, dan mendorong pemerataan pembinaan umat di wilayah binaan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama pada Tahun 2025, target rasio 1:4 telah terealisasi. Ketercapaian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama telah menjalankan fungsi pembinaan dengan ritme yang konsisten dan memenuhi standar minimal pembinaan kelompok sasaran. Pencapaian ini juga mengindikasikan bahwa pola kerja penyuluh telah berjalan secara terstruktur, mulai dari pemetaan kelompok binaan, penjadwalan pembinaan, pelaksanaan kegiatan, hingga dokumentasi dan pelaporan, sehingga pembinaan tidak berlangsung sporadis, melainkan berkesinambungan. Lebih jauh, tercapainya rasio 1:4 memberi makna bahwa layanan bimbingan keagamaan telah menjangkau kelompok sasaran secara memadai sesuai ketentuan target kinerja. Kelompok sasaran yang dimaksud umumnya mencakup berbagai komunitas dan segmen masyarakat yang membutuhkan penguatan nilai-nilai keagamaan, pendampingan rohani, serta pembinaan moral dan sosial. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan memiliki dampak substantif terhadap penguatan kehidupan beragama di tingkat komunitas.

Walaupun target rasio tercapai, dalam implementasinya terdapat tantangan yang memerlukan perhatian agar kualitas pembinaan tetap terjaga

dan pemerataan layanan semakin optimal. Hambatan yang paling nyata adalah kondisi struktural di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas, dengan sebaran kecamatan dan jarak antarwilayah yang tidak selalu mudah dijangkau. Di sisi lain, masih terdapat kecamatan yang belum memiliki penyuluh agama secara merata, sehingga pada beberapa situasi penyuluh yang tersedia harus merangkap wilayah binaan atau melakukan pembinaan lintas wilayah. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi intensitas pembinaan jika tidak diatur dengan manajemen wilayah binaan yang baik, terutama ketika akses transportasi, waktu tempuh, serta kesiapan kelompok sasaran berbeda-beda antarwilayah.

Tantangan lain yang juga mempengaruhi pelaksanaan bimbingan adalah dinamika kelompok sasaran, seperti perbedaan tingkat partisipasi, jadwal kegiatan masyarakat, serta kondisi sosial-ekonomi yang dapat berdampak pada konsistensi pertemuan. Dalam situasi tertentu, penyuluh perlu melakukan penyesuaian metode pembinaan, misalnya dengan pendekatan kunjungan, konseling, pembinaan tematik, atau penguatan jejaring tokoh lokal agar pembinaan tetap berjalan dan tidak terputus. Untuk memastikan rasio tidak hanya tercapai secara angka tetapi juga berkualitas secara substansi, dilakukan berbagai upaya penguatan pelaksanaan, antara lain:

- Penguatan perencanaan wilayah binaan dan pemetaan kelompok sasaran, sehingga setiap penyuluh memiliki daftar kelompok binaan yang jelas, terukur, dan realistis sesuai kondisi lapangan.
- Penjadwalan pembinaan yang lebih disiplin dan terstruktur, dengan memperhatikan ritme kegiatan masyarakat serta mengupayakan konsistensi pertemuan agar pembinaan tidak hanya formalitas.
- Optimalisasi metode pembinaan hybrid/daring pada wilayah tertentu yang sulit dijangkau secara rutin, sehingga pembinaan tetap bisa berlangsung walaupun ada kendala jarak.
- Penguatan koordinasi dengan tokoh agama dan pengurus komunitas setempat, sehingga keberlanjutan pembinaan dapat terbantu oleh dukungan lokal dan partisipasi kelompok sasaran meningkat.
- Peningkatan akurasi dan intensitas pelaporan kegiatan melalui sistem pelaporan digital, khususnya dengan mulai diintensifikannya penggunaan E-Pakris (E-Penyuluh Agama Kristen). Melalui E-Pakris, data pembinaan kelompok sasaran dapat dicatat lebih tertib, terdokumentasi, dan mudah

dipantau untuk kepentingan monitoring dan evaluasi, sekaligus mendorong profesionalitas kerja penyuluh berbasis data.

Dengan adanya penguatan tersebut, ketercapaian rasio 1:4 menjadi lebih terjamin tidak hanya dari sisi pemenuhan target, tetapi juga dari sisi kepastian bahwa kelompok sasaran benar-benar memperoleh bimbingan agama secara nyata dan berkesinambungan. Intensifikasi pelaporan digital juga membantu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, serta menjadi dasar untuk perbaikan layanan pada triwulan/periode berikutnya.

Dengan demikian, progres capaian indikator Rasio Penyuluh Agama dengan Kelompok Sasaran yang Mendapatkan Bimbingan Agama pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ke depan, fokus penguatan akan diarahkan pada peningkatan pemerataan layanan antarwilayah, optimalisasi pola pembinaan pada kecamatan yang belum terisi penyuluh secara memadai, serta konsistensi pelaporan digital agar kualitas pembinaan dan profesionalitas kerja penyuluh semakin meningkat.

(3) Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan

Capaian kinerja pada indikator Peningkatan Jumlah Layanan Bimbingan Keluarga yang Disediakan dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang secara langsung mengintervensi indikator tersebut pada Tahun 2025. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana layanan bimbingan keluarga dapat diselenggarakan secara aktif, terstruktur, dan menjangkau keluarga sasaran di wilayah binaan penyuluh agama. Layanan bimbingan keluarga dimaksud mencakup pembinaan keluarga Kristen, konsultasi pastoral, pendampingan permasalahan keluarga, penguatan nilai-nilai kehidupan berumah tangga, serta pembinaan ketahanan keluarga berbasis nilai keagamaan. Target capaian yang ditetapkan sebesar 60 (enam puluh) layanan bimbingan keluarga merupakan target kuantitatif yang dirumuskan sebagai jumlah minimal layanan yang diharapkan dapat terlaksana selama periode pelaporan. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan jumlah penyuluh agama, potensi kelompok sasaran, serta kebutuhan pembinaan keluarga di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan realisasi kegiatan pada Tahun 2025, capaian yang diperoleh berada pada angka 50% dari target yang ditetapkan. Artinya,

layanan bimbingan keluarga telah dilaksanakan namun belum mencapai jumlah yang direncanakan secara penuh. Secara administratif, indikator ini belum mencapai target maksimal, namun tetap menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan yang nyata dan berdampak di lapangan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian indikator ini antara lain:

- Keterbatasan waktu pelaksanaan dalam periode berjalan, terutama karena pembagian waktu penyuluh yang juga harus melaksanakan tugas pembinaan kelompok umum, kegiatan keagamaan lainnya, serta kewajiban administrasi dan pelaporan.
- Belum meratanya distribusi penyuluh agama di seluruh kecamatan, sehingga pada beberapa wilayah layanan keluarga belum dapat dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan.
- Tingkat partisipasi keluarga sasaran yang bervariasi, dimana tidak semua keluarga secara aktif mengajukan atau mengikuti layanan bimbingan, khususnya pada kasus yang bersifat sensitif atau privat.
- Dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan, dimana fokus pelayanan pada periode tertentu lebih banyak terserap pada kegiatan pembinaan kelompok atau agenda keagamaan yang bersifat massal.

Selain faktor tersebut, kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas dan karakteristik wilayah yang beragam juga mempengaruhi frekuensi layanan secara langsung, khususnya di kecamatan yang belum memiliki penyuluh tetap dan harus dilayani lintas wilayah. Meskipun capaian kuantitatif berada pada angka 50%, layanan yang telah diberikan tetap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penguatan ketahanan keluarga dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Bimbingan keluarga yang terlaksana telah membantu keluarga sasaran dalam menyelesaikan persoalan internal, meningkatkan komunikasi keluarga, serta memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, dampak layanan tetap dirasakan secara kualitatif meskipun jumlahnya belum mencapai target maksimal. Sebagai langkah perbaikan dan penguatan capaian pada periode berikutnya, beberapa strategi telah dan akan terus diupayakan, antara lain:

- ❖ Optimalisasi perencanaan layanan keluarga agar lebih terjadwal dan terukur per penyuluh.

- ❖ Pemetaan kebutuhan keluarga sasaran berdasarkan wilayah binaan untuk memastikan prioritas layanan yang lebih tepat.
- ❖ Penguatan pendekatan proaktif melalui kunjungan dan sosialisasi layanan bimbingan keluarga agar partisipasi meningkat.
- ❖ Integrasi pelaporan layanan melalui sistem digital (E-Pakris) guna memastikan dokumentasi kegiatan tercatat secara akurat dan dapat dimonitor secara berkala.
- ❖ Peningkatan koordinasi dengan gereja dan lembaga keagamaan setempat agar layanan keluarga dapat bersinergi dengan pembinaan pastoral yang telah berjalan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan capaian indikator pada periode berikutnya dapat meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun progres capaian pada Tahun 2025 berada pada angka 50%, layanan bimbingan keluarga tetap berjalan dan memberikan dampak positif, serta menjadi dasar evaluasi untuk penguatan perencanaan dan pemerataan layanan ke depan

10) Meningkatnya kualitas jemaah haji

Sasaran dalam kegiatan ini terdiri dari 1 indikator, yaitu (1) Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota mencapai 100%. Capaian indikator kinerja persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup optimal meskipun belum sepenuhnya memenuhi alokasi kuota. Berdasarkan kebijakan Kementerian Agama RI, kuota prioritas lansia ditetapkan sebesar 5% dari total 527 jemaah, yaitu sebanyak 38 jemaah lansia. Namun demikian, realisasi pemberangkatan hanya mencapai 30 jemaah atau sebesar 5,69% dari total jemaah, yang disebabkan oleh faktor kesehatan dan tingginya risiko medis pada sebagian calon jemaah lansia sehingga tidak direkomendasikan untuk berangkat. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses seleksi kesehatan telah dilaksanakan secara ketat dan sesuai prinsip kehati-hatian untuk menjamin keselamatan jemaah. Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan kesehatan dan pendampingan sejak awal masa tunggu agar kesiapan fisik jemaah lansia dapat ditingkatkan, sehingga kuota yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kelayakan kesehatan.

11) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator, yaitu (1) Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan mencapai 100%, (2) Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu mencapai 100%.

(1) Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan

Capaian indikator kinerja persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana serta standar pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejalan dengan arah kebijakan transformasi layanan publik di lingkungan Kementerian Agama RI. Indikator ini bertujuan untuk mengukur efektivitas integrasi layanan haji dan umrah dalam satu atap melalui Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang representatif, baik dari aspek fasilitas maupun kualitas pelayanan. Peningkatan capaian tercermin dari lonjakan jumlah pendaftaran calon jemaah haji, dari 939 orang pada tahun 2024 menjadi 1.464 orang pada tahun 2025, yang mengindikasikan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan.

Keberhasilan ini didukung oleh terpenuhinya standar sarana dan prasarana seperti ketersediaan fasilitas ruang tunggu yang memadai, sanitasi yang layak, serta dukungan konsumsi dasar bagi pengguna layanan, serta peningkatan kualitas pelayanan melalui sistem informasi yang lebih stabil sehingga mampu menurunkan waktu tunggu dari rata-rata 60 menit menjadi 30 menit. Selain itu, profesionalisme dan sikap responsif petugas turut memperkuat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan yang cepat dan akurat. Meskipun demikian, untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja, masih diperlukan penguatan inovasi layanan melalui digitalisasi sistem antrean yang terintegrasi dengan platform berbasis mobile guna mengurangi potensi penumpukan layanan serta meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi calon jemaah.

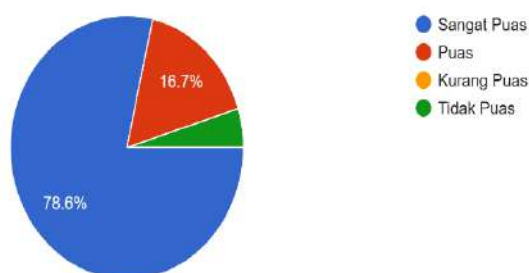


Gambar 21 Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu

(2) Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu

Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umrah terpadu (PLHUT) merefleksikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, yang diukur melalui beberapa unsur pelayanan meliputi prosedur, waktu pelayanan, spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, serta perilaku pelaksana. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2025, dari total 63 responden layanan PLHUT, sebanyak 52 responden (78,6%) menyatakan **sangat puas** dan 11 responden (16,7%) menyatakan **puas**, sehingga secara kumulatif tingkat kepuasan mencapai 95,3% dan telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 86%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah berjalan efektif, didukung oleh standar operasional yang jelas, kecepatan layanan yang semakin baik, serta kompetensi dan sikap profesional petugas dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada calon jemaah. Meskipun demikian, terdapat ruang perbaikan yang perlu menjadi perhatian, khususnya dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan pada seluruh unsur penilaian serta meningkatkan jumlah partisipasi responden agar hasil survei semakin representatif. Penguatan mekanisme umpan balik masyarakat dan inovasi pelayanan berbasis digital juga menjadi langkah strategis untuk mempertahankan bahkan meningkatkan tingkat kepuasan di masa yang akan datang.



12) Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

Sasaran dalam kegiatan ini terdiri dari 1 indikator, yaitu (1) Persentase calon jemaah haji yg memperoleh sertifikat manasik haji mencapai

120%. Capaian indikator kinerja persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal, dengan realisasi mencapai 100%. Dari total 527 calon jemaah haji yang mengikuti bimbingan manasik, seluruhnya dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat sebagai salah satu prasyarat kesiapan keberangkatan.

Capaian ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan bimbingan manasik telah berjalan efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesiapan, dan kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah haji. Keberhasilan tersebut didukung oleh tingginya kesadaran jemaah terhadap pentingnya manasik, peran pembimbing yang profesional dan kompeten, serta pemanfaatan media pembelajaran yang variatif termasuk alat peraga dan pendekatan visual yang membantu, khususnya bagi jemaah lansia. Namun demikian, masih terdapat kendala yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan kondisi fisik sebagian jemaah lansia yang memerlukan pendekatan pembelajaran lebih adaptif serta terbatasnya durasi bimbingan tatap muka yang berpotensi membatasi pendalaman materi. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, diperlukan inovasi penguatan metode bimbingan melalui pengembangan modul manasik berbasis digital (video interaktif) yang dapat diakses secara fleksibel oleh jemaah, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, dan efektif.



Gambar 22 Sertifikat Manasik Haji 2025



Gambar 23 Penyelenggaraan Manasik Haji Akbar 2025

13) Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 Indikator kinerja, yaitu Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan mencapai 73,68%.



Gambar 24 Wisuda Santri

Capaian indikator Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 70% dari target 95%, dengan capaian kinerja sebesar 73,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kelulusan dengan predikat unggul belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, meskipun secara umum kualitas lulusan tetap berada pada kategori baik. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain tantangan santri dalam membagi waktu antara pendidikan formal, kajian diniyah, dan hafalan Al-Qur'an, keterbatasan pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran, keterbatasan tenaga pengelola dan fasilitas pendukung di beberapa lembaga, serta aspek kesiapan psikologis santri dalam menjalani kehidupan pesantren. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dioptimalkan, seperti meningkatnya

akses beasiswa bagi lulusan berprestasi, kebutuhan tenaga pendidik berkualifikasi unggul, serta lingkungan pesantren yang mendukung integrasi antara penguatan ilmu dan pembentukan karakter. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan kapasitas pengajar, serta optimalisasi dukungan sarana dan metode pembelajaran agar capaian indikator ini dapat meningkat pada periode berikutnya.

14) Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana mencapai 100%, (2) Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif mencapai 100%, (3) Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan mencapai 100%, (4) Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) mencapai 120%, (5) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah mencapai 120%.

(1) Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

Pada tahun 2025, capaian tersebut mengalami peningkatan yang lebih progresif, didorong oleh penguatan kebijakan afirmatif, percepatan realisasi anggaran, serta sinergi antara Kementerian Agama daerah dengan pemerintah setempat. Kenaikan persentase ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola bantuan, peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta komitmen dalam mendukung standar nasional pendidikan. Secara umum, perkembangan dari 2024 ke 2025 menunjukkan arah positif, baik dari sisi kuantitas madrasah penerima maupun kualitas sarana prasarana yang ditingkatkan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan di madrasah.

(2) Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif

Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator kinerja, yaitu telah dilaksanakan kegiatan Pelantikan Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Kutai Kartanegara Masa Khidmat 2025-2029 pada tanggal 27 Februari 2025. Dengan dilantikannya pengurus bertanggung jawab untuk mendukung dan memajukan pendidikan inklusif di lingkungan madrasah dan pengurus

berkomitmen untuk melaksanakan program kerja yang telah dirancang sesuai dengan visi dan misi forum.



Gambar 25 Pelantikan Forum Madrasah Inklusif

(3) Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan Pendidikan

Berdasarkan capaian kinerja pada indikator persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan madrasah, realisasi kegiatan menunjukkan hasil yang sangat optimal, yaitu 100% ketercapaian dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Seluruh madrasah dan Raudhatul Athfal (RA) di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terdiri dari 36 Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 23 RA, telah memenuhi indikator peningkatan jumlah siswa sebagai dasar pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Adapun Kendala Variasi Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah Perbedaan karakteristik wilayah pendidikan, khususnya madrasah yang berada di daerah terpencil atau dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terbatas, berpotensi menghambat pemerataan peningkatan jumlah siswa. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pada Sebagian Madrasah Meskipun capaian target terpenuhi, masih terdapat madrasah yang memiliki keterbatasan ruang belajar dan fasilitas pendukung, sehingga berpotensi membatasi daya tampung peserta didik di masa mendatang. Ketergantungan pada data pelaporan manual proses pengumpulan dan validasi data jumlah siswa pada sebagian satuan pendidikan masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko menimbulkan keterlambatan dan ketidaktepatan data. Sedangkan Peluangnya yaitu Penguatan Pemerataan Akses Pendidikan Berkualitas Capaian 100% menunjukkan keberhasilan intervensi kebijakan dan dapat menjadi dasar penguatan program pemerataan akses pendidikan madrasah di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Madrasah dan RA mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat, yang menjadi modal penting bagi

pengembangan mutu layanan pendidikan. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data capaian kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan program lanjutan, termasuk pengajuan bantuan sarana prasarana dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada indikator persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan madrasah menunjukkan tren kinerja yang positif dan berkelanjutan. Pada Tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan telah tercapai sesuai perencanaan, dengan capaian realisasi yang mencerminkan stabilitas jumlah peserta didik pada sebagian besar madrasah dan RA di setiap wilayah pendidikan. Memasuki Tahun 2025, target kinerja ditetapkan lebih tinggi sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Melalui intervensi kegiatan yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan wilayah, realisasi kinerja pada Tahun 2025 tidak hanya mampu memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampaui capaian Tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya indikator peningkatan jumlah siswa pada seluruh madrasah dan RA di setiap wilayah pendidikan. Secara manajerial, peningkatan capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan program, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta efektivitas monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, capaian ini menjadi dasar yang kuat untuk menjaga kesinambungan program serta mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan madrasah pada tahun-tahun berikutnya

(4) Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

Capaian Kinerja dinilai berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator kinerja yaitu Jumlah Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan berdasarkan jumlah keseluruhan madrasah di setiap wilayah pendidikan sebagai dasar penetapan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. Dari 80 % target realisasi kinerja ini seluruh madrasah dan RA telah memenuhi pencapaian dari jumlah 36 MI dan 23 RA di Kab. Kutai Kartanegara Dengan demikian, realisasi kinerja untuk kegiatan ini mencapai persentase 100% sehingga capaian kinerja dalam indikator ini mencapai 120%.

Siswa Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD

No	Nama Siswa	NISN	Sekolah	Kelas	Tahun Masuk	Status Siswa (aktif/tidak aktif)
1	HANIF ZAYAN SAFARAZ	3180501434	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
2	MUHAMMAD RAHMAN	3195453009	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
3	AHMAD MUHIBBAN	3181456788	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
4	SALSABILA NUR ANNISA	3193590737	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
5	MUHAMMAD FAQIH	3185903242	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
6	MAISYA ADZKIYATUNNISA	3195126991	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
7	ANITA YUSNA	3187561510	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
8	AZKIA FATIN RAMADHANI	3181514488	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
9	RAUDAH	3182806085	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
10	MUHAMMAD REFANSYAH		MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	I	2025	AKTIF
11	Atifah Nahda Oktavia	3184939094	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
12	Ahmad Juan Al Hafidz	3182008015	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
13	Ahmad Maulana	3187129766	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
14	Ahmad Syarif Hidayatullah	3198963003	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
15	Dinda Khairun Nisa	3196187898	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
16	Dzul Fadli ibni Yakhsya	3183823275	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
17	Hafizah Azkadina Almeera	3181088598	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
18	Haikal Rifai	3181373508	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
19	M. Reyza Aditya	3197364188	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif
20	Mecca Latisha Aryan	3186096935	MI AI - Hidayah Samboja	1A	2025	Aktif

Gambar 26 Data Siswa Kelas 1 MI mengikuti PAUD

(5) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah

Capaian kinerja pada indikator persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah menunjukkan perkembangan yang positif melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan UKS, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, serta koordinasi lintas sektor dengan puskesmas dan dinas kesehatan setempat. Peningkatan persentase tersebut didorong oleh penguatan peran tim pelaksana di tingkat satuan pendidikan, penyediaan sarana pendukung kesehatan dasar, serta monitoring berkala terhadap implementasi program. Melalui kegiatan yang terstruktur dan kolaboratif, layanan kesehatan sekolah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mulai terintegrasi dalam budaya hidup sehat di lingkungan pendidikan, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan peserta didik secara berkelanjutan.



Gambar 27 Layanan Kesehatan pada Madrasah

Secara manajerial, kendala dalam peningkatan persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah umumnya meliputi keterbatasan anggaran operasional, belum meratanya ketersediaan sarana UKS, serta kapasitas SDM yang belum seluruhnya memahami standar layanan kesehatan sekolah. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan fasilitas kesehatan setempat terkadang belum berjalan optimal karena perbedaan prioritas program. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk penguatan program melalui integrasi perencanaan berbasis data kesehatan peserta didik, peningkatan kemitraan strategis dengan puskesmas dan instansi terkait, serta pemanfaatan pendekatan edukatif yang menanamkan budaya hidup sehat di sekolah. Dengan manajemen yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis evaluasi kinerja, kendala tersebut dapat diminimalkan sekaligus memperluas cakupan layanan kesehatan sekolah secara berkelanjutan.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada indikator persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah menunjukkan adanya peningkatan konsistensi pencapaian. Pada Tahun 2024, realisasi capaian relatif baik namun masih menghadapi beberapa kendala teknis seperti keterbatasan sarana UKS dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor, sehingga terdapat selisih kecil antara target dan realisasi. Sementara itu, pada Tahun 2025, perencanaan yang lebih terintegrasi, penguatan monitoring, serta peningkatan kolaborasi dengan fasilitas layanan kesehatan berdampak pada realisasi yang lebih mendekati bahkan melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 menunjukkan perbaikan dari sisi efektivitas pelaksanaan program dan kualitas manajemen dibandingkan Tahun 2024

15) Meningkatkan sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan mencapai 100%, (2) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah mencapai 100%.

- (1) Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan

Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi peningkatan jumlah santri pada satuan Pendidikan keagamaan indikator, yaitu persentase peningkatan jumlah santri pada satuan Pendidikan keagamaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 95%. Selama periode pelaporan, Berdasarkan data Emis jumlah santri pada tahun 2025 terdapat sebanyak 5072 santri sehingga realisasi capaian indikator mencapai 100%, dan telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan pesantren di Kabupaten Kutai Kartanegara mampu membentuk karakter, kedisiplinan dan pemahaman agama.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja organisasi. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya validasi dan sinkronisasi data, di mana masih terdapat perbedaan antara data pada sistem EMIS dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pembaruan data, keterbatasan pemahaman operator, serta belum maksimalnya proses verifikasi berjenjang, sehingga berpotensi mempengaruhi akurasi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Selain itu, kualitas layanan lembaga pendidikan juga masih perlu ditingkatkan, yang ditandai dengan keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pendidik yang kompeten, serta belum optimalnya pengembangan kurikulum yang inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Di sisi lain, meningkatnya kompetisi antar lembaga pendidikan menuntut adanya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan agar tetap mampu menarik minat masyarakat. Meskipun demikian, terdapat berbagai peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan keagamaan memberikan ruang yang besar untuk penguatan kelembagaan, baik melalui program bantuan, dukungan anggaran, maupun kebijakan afirmatif lainnya. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pentingnya pendidikan keagamaan sebagai respons terhadap kekhawatiran akan degradasi moral remaja menjadi peluang dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, termasuk pemanfaatan media sosial, juga membuka peluang

dalam meningkatkan transparansi layanan, efisiensi pengelolaan data, serta memperluas jangkauan informasi melalui konten yang kreatif dan inovatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah untuk mengatasi kendala sekaligus mengoptimalkan peluang yang ada, antara lain melalui peningkatan kualitas pengelolaan data berbasis sistem yang terintegrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dan inovatif, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung layanan dan publikasi kelembagaan. Dengan upaya tersebut, diharapkan kinerja organisasi dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.

(2) Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah

Capaian kinerja dihitung berdasarkan Persentase satuan pendidikan keagamaan dan pesantren yang telah menyediakan dan menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah (UKS atau bentuk layanan kesehatan lainnya) dibandingkan dengan jumlah seluruh satuan pendidikan binaan. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 80%. Selama periode pelaporan, Setiap Pesantren menyelenggarakan layanan Kesehatan sekolah sehingga realisasi capaian indikator mencapai 100%, dan telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80%.

16) Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA) mencapai 120%, (2) Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu mencapai 105%.

(1) Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)

Capaian kinerja dihitung berdasarkan persentase siswa baru pada tingkat Ula (setara SD/MI pada Pendidikan Diniyah Formal/PKPPS) yang sebelumnya telah menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/RA/BA). Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 10%. Berdasarkan pendataan siswa baru kelas 1 Ula, realisasi di lapangan menunjukkan angka



Adapun Kendala dan Peluang Secara manajerial, capaian realisasi kinerja sebesar 100% pada indikator persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu menunjukkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pendidikan madrasah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kendala yang dihadapi antara lain perbedaan kapasitas manajemen akademik antar madrasah, variasi kondisi peserta didik, serta keterbatasan sarana pendukung pembelajaran pada sebagian satuan pendidikan, namun dapat diminimalkan melalui koordinasi intensif, pendampingan teknis, dan monitoring berkala. Di sisi lain, capaian ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat budaya mutu, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, serta menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program peningkatan kualitas layanan pendidikan agar capaian kelulusan tepat waktu dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada setiap indikator kinerja menunjukkan adanya peningkatan dan konsistensi capaian kinerja. Pada Tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan umumnya telah tercapai sesuai dengan rencana, meskipun pada beberapa indikator capaian masih berada pada batas minimal target yang ditentukan. Capaian tersebut menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan target kinerja Tahun 2025. Memasuki Tahun 2025, target kinerja ditetapkan lebih optimal sebagai bentuk penguatan komitmen peningkatan mutu layanan dan pemerataan akses. Melalui perbaikan perencanaan, peningkatan koordinasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif, realisasi kinerja Tahun 2025 tidak hanya mampu memenuhi target, tetapi juga menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian Tahun 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas pengelolaan program dan meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja.

17) Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu (1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi mencapai 100%, (2) Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran mencapai 120%, (3) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler mencapai 100%, (4) Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan

kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab) mencapai 120%.



Gambar 30 Kegiatan Kepramukaan

18) Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu (1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional mencapai 66,66%, (2) Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren mencapai 100%, (3) Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri mencapai 100%

(1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional

Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator kinerja, yaitu Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional. Target rata-rata nilai yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 66.80. Berdasarkan hasil pelaksanaan Asesmen Kompetensi (AKMI/Ujian Pendidikan Kesetaraan) pada PKPPS, realisasi nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 44.53. Berdasarkan perhitungan realisasi terhadap target, capaian kinerja untuk indikator ini berada pada angka 66,66%. Meskipun belum mencapai target ideal yang ditetapkan, pelaksanaan asesmen telah berjalan lancar dan diikuti oleh satuan pendidikan yang ditunjuk. Nilai ini menjadi evaluasi penting untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan memotivasi santri untuk meningkatkan pemahamannya dalam menerima materi.

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	HASIL TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) JENJANG MA													
2	PKPPS KALTIM													
3	Nama Sekolah	hasa Indonesia	Matematika	hasa Inggris	PPKn	Antropologi	litif dan Kewa	Indonesia	ematika	Lasa Inggris	Biologi	Sosiologi	Ekonomi	Kimia
4	PPS Al-Husna	51.5	37.77	23.39	0	47.35	44.6	0	26.66	34.46	46.37	53.63	26.94	0
5	PPS Al Falah	52.59	24.45	20.66	0	0	0	0	0	0	0	50.28	28.11	0
6	PPS Nurul Amin	49.33	32.86	24.48	56.48	0	45.7	69.9	38.1	31.22	58.07	53.39	31.43	0
7	PPS Rahmatullah	57.41	32.77	25.18	0	0	0	0	0	0	0	0	24.27	0
8	PPS Tahfizul Qur'an Ahlus Shuffah	49.99	32.48	24.83	56.68	0	46.81	70.58	31.49	42.38	0	66.9	27.4	0
9	PPS Syekh M. Arsyad Al Banjari	55.78	29.68	31.73	56.79	0	0	0	34.95	52.72	0	0	0	0
10	PPS Subulussalam	48.84	36.14	24.73	0	0	64.25	0	0	0	0	0	0	0
11	Ibnu Karim	39.57	26.44	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0	28.08	0
12	PPS. DAARURRAHMAN	36.06	22.6	28.52	0	0	0	57.81	0	0	0	0	38.25	0
13	PPS. AL-ISLAMI NURUL ANWAR	44.5	28.85	15.83	47.28	0	54.86	67.91	0	0	0	0	27.48	0
14	PPS. AL-MUHAJIR	62.01	33.28	9.53	57.23	0	0	84.67	0	0	0	70.83	0	0
15	PPS. AL-JAMIL	61.47	20.84	17.24	0	0	0	80.37	0	0	0	54.83	0	0
16	RATA-RATA NASIONAL	51.37	34.88	24.84	57.87	69.98	50.54	64.91	38.77	41.84	52.7	55.95	30.05	34.13
17	RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	50.63	31.77	23.21	56.03	47.35	47.59	70.43	32.8	40	54.17	56.13	27.76	0

Gambar 31 Hasil TKA Jenjang MA

Analisis manajemen terhadap kendala dan peluang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan asesmen kompetensi pada PKPPS, antara lain tingkat kesulitan soal yang belum sepenuhnya selaras dengan kurikulum yang diajarkan, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi untuk asesmen berbasis komputer di beberapa pondok pesantren, serta kesiapan santri yang masih perlu ditingkatkan dalam menghadapi soal berbasis literasi dan numerasi yang kompleks.

Namun demikian, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian kinerja, antara lain melalui pelaksanaan program pelatihan dan bimbingan teknis bagi tenaga pendidik guna memperkuat kualitas pembelajaran literasi dan numerasi, pemanfaatan platform digital sebagai media latihan (try out) sebelum asesmen nasional, serta penguatan sinergi dengan bidang pendidikan madrasah dalam berbagi praktik baik pembelajaran. Pemanfaatan peluang tersebut diharapkan mampu meminimalkan kendala yang ada serta mendorong peningkatan hasil asesmen secara berkelanjutan.

(2) Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren

Capaian kinerja dihitung berdasarkan penilaian karakter keberagamaan santri dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan pesantren. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 70.30%. Berdasarkan penilaian penerapan nilai keberagamaan, realisasi yang dicapai adalah sebesar 70.30%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai keagamaan (ubudiyah dan akhlakul karimah) di lingkungan pesantren berjalan efektif dan sesuai standar yang diharapkan.



Gambar 32 Kegiatan Keagamaan

Analisis manajemen terhadap kendala dan peluang menunjukkan bahwa penguatan nilai keberagamaan santri masih menghadapi tantangan berupa dinamika pergaulan luar serta akses media sosial yang mulai mempengaruhi pola pikir santri, serta belum adanya parameter baku yang dapat mengukur nilai keberagamaan secara kuantitatif di berbagai pesantren yang memiliki karakteristik beragam. Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dioptimalkan, antara lain melalui penguatan peran pengasuh dan ustadz sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari, integrasi nilai-nilai keberagamaan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang lebih menarik dan relevan bagi santri milenial, serta peningkatan kerja sama dengan orang tua atau wali santri dalam memantau perkembangan perilaku santri, khususnya saat berada di luar lingkungan pesantren. Pemanfaatan peluang tersebut diharapkan mampu meminimalkan kendala serta meningkatkan internalisasi nilai keberagamaan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

(3) Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri

Capaian kinerja dihitung berdasarkan penilaian santri dalam proses belajar mengajar terkait pemahaman dan penerapan moderasi beragama di kalangan santri. Target nilai yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 78.00. Realisasi di lapangan menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu mencapai nilai 78.00 sehingga untuk capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian ini membuktikan efektivitas program penguatan moderasi beragama yang telah diintegrasikan ke dalam kurikulum dan kegiatan kepesantrenan.



Gambar 33 Penguatan Moderasi Beragama Santri

Analisis manajemen terhadap kendala dan peluang menunjukkan bahwa upaya penguatan moderasi beragama masih menghadapi tantangan berupa maraknya narasi ekstrem di media sosial yang dapat diakses oleh santri maupun alumni, serta beragamnya pemahaman terhadap literatur kitab kuning yang memerlukan kontekstualisasi agar selaras dengan isu moderasi masa kini. Namun demikian, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan, antara lain melalui penyelenggaraan pemilihan Duta Moderasi Beragama sebagai agen perubahan di lingkungan pesantren, penyediaan buku saku atau modul digital yang mudah dipahami, serta pelibatan tokoh agama dan kyai kharismatik dalam mengampanyekan nilai-nilai moderasi beragama. Optimalisasi peluang tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan implementasi moderasi beragama secara lebih efektif di lingkungan pesantren.

19) Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran mencapai 100%. Capaian Indikator digunakan untuk mengukur tingkat transformasi digital pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar. Capaian indikator ini dinilai berdasarkan dua komponen utama, yaitu:

- a. Ketersediaan materi ajar digital yang telah disusun, dikembangkan, atau dihimpun oleh guru maupun seksi pendais; dan
- b. Tingkat pemanfaatannya dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Dasar perhitungan indikator mengacu pada jumlah media pembelajaran digital yang tersedia dan terverifikasi dibandingkan dengan total media pembelajaran yang digunakan sesuai kurikulum yang berlaku. Selain itu, penggunaan materi ajar digital diukur melalui laporan pemanfaatan oleh guru, dokumentasi pembelajaran, serta monitoring yang dilakukan oleh pengawas.



Gambar 34 Media Pembelajaran dengan Canva

Analisis capaian indikator persentase materi ajar digital yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa kinerja tahun 2025 dipengaruhi oleh peluang dan tantangan yang signifikan. Dari sisi peluang, penguatan transformasi digital pendidikan, meningkatnya literasi digital guru, serta ketersediaan berbagai platform distribusi digital menjadi faktor utama dalam mendorong pengembangan dan pemanfaatan materi ajar digital secara lebih luas. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi, variasi kompetensi guru dalam pembuatan konten digital, belum optimalnya konsistensi penggunaan dalam pembelajaran, serta perlunya standarisasi dan kurasi konten agar sesuai dengan kurikulum. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan, terutama pada aspek ketersediaan materi ajar digital melalui penguatan kapasitas guru dan pengembangan konten pembelajaran. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan materi ajar digital belum sepenuhnya merata di seluruh satuan pendidikan, sehingga masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatannya secara optimal.

20) Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 5 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B mencapai 100%, (2) Persentase MI yang terakreditasi minimal B mencapai 100%, (3) Persentase MTs yang terakreditasi minimal B mencapai 100%, (4) Persentase MA yang terakreditasi minimal B mencapai 100%, (5) Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional mencapai 100%.

Proses akreditasi madrasah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan melalui kerja sama dengan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Akreditasi ini bertujuan untuk menilai kelayakan dan kinerja madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan yang mencakup aspek mutu pembelajaran, tata kelola, sarana prasarana, serta kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan akreditasi diawali dengan tahap pengisian instrumen evaluasi diri oleh madrasah melalui sistem berbasis digital yang telah disediakan. Pada tahap ini, madrasah melakukan penilaian mandiri terhadap capaian kinerja sesuai indikator yang ditetapkan, sekaligus melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti fisik. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan validasi data oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN PAUD DIKDASMEN untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan dengan kondisi riil di lapangan. Tahapan berikutnya adalah visitasi atau penilaian lapangan, di mana asesor melakukan observasi langsung terhadap proses pembelajaran, manajemen madrasah, serta kondisi sarana dan prasarana. Selain itu, dilakukan wawancara dengan kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kualitas layanan pendidikan. Hasil dari visitasi ini kemudian menjadi dasar dalam penetapan nilai akreditasi melalui mekanisme penilaian yang objektif dan terstandar.

Selanjutnya, hasil akreditasi ditetapkan dalam bentuk peringkat akreditasi yang mencerminkan tingkat mutu madrasah, yang kemudian diumumkan secara resmi. Hasil tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengakuan terhadap kualitas lembaga, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan. Madrasah dengan hasil akreditasi yang belum optimal didorong untuk melakukan perbaikan melalui pembinaan dan pendampingan.

Dengan adanya proses akreditasi yang terstruktur dan kredibel, diharapkan madrasah mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan madrasah.

NO	KABUPATEN/ KOTA	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS/ PERINGKAT AKREDITASI	
1	KABUPATEN BERAU	70029660	SMP INSAN MULIA KABUPATEN BERAU	A	
2	KABUPATEN KUTAI BARAT	70040563	SD IT MULIA ABADI	A	
3	KABUPATEN KUTAI BARAT	70040897	SMP MODERN SALSABILA KUBAR	A	
4	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	69993792	MI MIFTAHUL ULUM MUARA JAWA	A	
5	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70035489	SD NEGERI 027 SEBULU	B	
16870	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70013799	MA AL-MUHHIBBIN	C
16871	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70025996	MA DAARUL QUR'AN WATTARBIYAH	B
16872	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70028045	MA DARUNNAFI'	B
16873	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70013917	MA ISHLAHUL UMMAH MUARA KAMAN	C
16874	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	69988481	SMA NEGERI 2 TABANG	B
16875	KALIMANTAN TIMUR	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70013872	SMK AL-IDRUS KUTAI KARTANEGARA	C

Gambar 35 Data Akreditasi Madrasah

21) Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 6 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal mencapai 111%, (2) Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional mencapai 100%, (3) Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya mencapai 100%, (4) Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan mencapai 100%, (5) Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan mencapai 100%, (6) Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual mencapai 100%.

- (1) Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal

Capaian indikator yang ditetapkan oleh Seksi PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dihitung dari 81 santri yang tersebar pada 6 PKPPS. Target yang ditetapkan adalah 90% Setelah dilakukan pendataan pesantren yang dilaksanakan secara daring, diketahui bahwa semua santri mengikuti UKN pada 6 pesantren ini telah menyelesaikan pendidikan setara formal/dinyatakan lulus. Dengan demikian, realisasi capaian kinerja adalah 100% yang melebihi dari target capaian yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi berupa faktor keberlanjutan belajar santri, keterbatasan dukungan akademik dan pembiayaan, serta sistem pemantauan kemajuan belajar yang belum optimal. Di sisi lain, terdapat peluang melalui penguatan kebijakan penyetaraan pendidikan, peningkatan dukungan program bantuan pendidikan, serta pengembangan sistem pembinaan dan pendampingan santri.

(2) Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Capaian kinerja indikator ini diukur berdasarkan jumlah santri pada 1 (satu) pondok pesantren yang mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu layanan pendidikan. Target Tahun 2025 ditetapkan bahwa pada 1 (satu) pondok pesantren terdapat santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional sebagai bentuk penguatan pembinaan prestasi dan pengembangan potensi santri. Berdasarkan data siswa yang mengikuti kompetisi, terdapat santri dari pondok pesantren tersebut yang telah berpartisipasi dalam kompetisi tingkat nasional. Keikutsertaan ini merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak pondok serta dukungan terhadap pengembangan bakat dan minat santri.

Dengan demikian, target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran kegiatan, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan komitmen pondok pesantren dalam mendorong prestasi santri di tingkat yang lebih luas.

(3) Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya

Capaian kinerja dihitung berdasarkan persentase satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah dinilai dan dievaluasi mutunya pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan

satuan pendidikan yang aktif. Pada Tahun 2025, berdasarkan data yang tersedia, satuan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang telah dilakukan penilaian dan evaluasi mutu mencapai 30 persen dari total satuan pendidikan yang ada.

Target persentase yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 30 persen, sehingga realisasi capaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian dan evaluasi mutu telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, pembinaan langsung ke lembaga, serta penguatan koordinasi antara satuan kerja dengan pengelola satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan.

(4) Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan

Kementerian Agama memiliki tanggung jawab penuh dalam pendampingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap berbagai satuan pendidikan pesantren serta lembaga pendidikan keagamaan. Hal ini didasarkan pada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan peraturan terkait pendidikan keagamaan. Satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan Kemenag, antara lain Satuan Pendidikan Pesantren, Pendidikan Diniyah, Pendidikan Diniyah Formal, Ma'had Aly, Pendidikan Pesantren Berbasis Kitab Kuning. Berdasarkan hal tersebut pendampingan merupakan kewajiban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mendampingi pondok pesantren di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 36 Pendampingan Pondok Pesantren

Analisa manajemen terhadap potensi kendala menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pendataan pesantren yang belum optimal melalui sistem EMIS, keterbatasan akses internet khususnya di wilayah terpencil, serta belum maksimalnya pendampingan program kemandirian ekonomi akibat kurangnya pedoman implementatif. Selain itu, masih ditemukan pesantren yang beroperasi tanpa izin resmi sehingga memerlukan pengetatan regulasi sesuai standar pendidikan dan keamanan.

Di sisi lain, terdapat potensi peluang yang cukup besar, antara lain melalui program kemandirian pesantren yang mendorong penguatan ekonomi berbasis komunitas, percepatan digitalisasi administrasi dan operasional melalui EMIS 4.0, serta peningkatan kualitas pendidik melalui pemberian insentif dan pelatihan oleh pemerintah daerah. Peluang ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola, mutu layanan pendidikan, serta kemandirian pesantren secara berkelanjutan.

(5) Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan

Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator kinerja, yaitu Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional. Target rata-rata nilai yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 95%. Berdasarkan data pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, realisasi nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 95%. berdasarkan perhitungan realisasi terhadap target, capaian kinerja untuk indikator ini berada pada angka 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase pesantren yang menyelenggarakan program pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di Lingkungan Pesantren berjalan efektif dan sesuai standar yang diharapkan.



Gambar 37 Pesantren Berdaya Berbasis Sumber Daya Ekonomi



Gambar 38 Pesantren Sumber Daya Ekonomi berkelanjutan

Analisa manajemen menunjukkan bahwa kendala utama dalam pengelolaan kemandirian ekonomi pesantren meliputi keterbatasan lahan, terbatasnya sumber daya manusia karena fokus pada kegiatan belajar mengajar, serta belum tersedianya jalur distribusi untuk hasil usaha ekonomi yang dihasilkan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki pesantren. Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain melalui pelatihan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerja sama dengan instansi terkait dalam pemanfaatan sumber daya, pengaturan jadwal piket bagi guru dan santri untuk mendukung pengelolaan ekonomi, serta pembangunan kerja sama dengan pedagang atau distributor guna memperlancar penyaluran hasil produksi. Pemanfaatan peluang ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mendukung kemandirian ekonomi pesantren secara berkelanjutan.

(6) Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual

Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator kinerja, yaitu Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional. Target rata-rata nilai yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 12.00%. berdasarkan data satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual, realisasi nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 12.00%. berdasarkan perhitungan realisasi terhadap target, capaian kinerja untuk indikator ini berada pada angka 100%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase satuan pendidikan pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual di Lingkungan Pesantren berjalan efektif dan sesuai standar yang diharapkan.

Analisa manajemen menunjukkan bahwa kendala dalam pengembangan program bilingual di pesantren meliputi masih terbatasnya jumlah pesantren yang menyelenggarakan program tersebut, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai dua bahasa, serta keterbatasan anggaran dalam merekrut tenaga pendidik yang kompeten di bidang bahasa asing. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi pembelajaran bilingual di lingkungan pesantren.

Namun demikian, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain melalui pelaksanaan pelatihan bahasa asing bagi guru pada satuan pendidikan pesantren, penerapan kurikulum berbasis bahasa asing, serta pembiasaan penggunaan bahasa asing dalam proses belajar mengajar. Pemanfaatan peluang tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM dan memperluas implementasi program bilingual secara bertahap dan berkelanjutan.

22) Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi 105,26%.

Berdasarkan data, terdapat 55 pondok pesantren resmi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah terdaftar dan memiliki izin operasional dari Kementerian Agama, sehingga lulusan dari pesantren tersebut memperoleh pengakuan kualifikasi secara resmi dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini didukung oleh verifikasi kelembagaan yang memastikan kurikulum dan proses pendidikan berjalan sesuai ketentuan, serta adanya penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan seperti Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) yang ijazahnya setara dengan jenjang pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) dan dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, hanya pesantren yang telah terdaftar resmi yang dijamin legalitas dan pengakuan lulusannya, sementara Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan mutu pendidikan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

55 Pesantren di Kukar akan Diawasi secara Ketat

Redaksi 27 Agustus 2025



Kepala Kantor Kemenag Kukar, Nasrun. (Berita Alternatif/Rifa')

BERITAALTERNATIF.COM – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Nasrun memastikan bahwa 55 pondok pesantren (ponpes) yang terdata resmi di Kemenag akan diawasi dan dibina secara ketat.

Gambar 39 Pesantren yang terdaftar di Kemenag dilakukan pengawasan dan pembinaan secara ketat

Analisis manajemen terhadap potensi kendala dan peluang menunjukkan bahwa meskipun seluruh pondok pesantren yang telah terdaftar dijamin pengakuan kualifikasinya, masih terdapat hambatan dalam proses perizinan, terutama karena sebagian pesantren masih dikelola secara tradisional, keterbatasan SDM yang memahami sistem administrasi berbasis digital, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas formal. Namun demikian, terdapat peluang yang cukup besar, antara lain dukungan regulasi melalui UU Nomor 18 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2021 yang memperkuat posisi pesantren, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pesantren berizin, pengakuan ijazah santri oleh negara, serta peluang transformasi menuju manajemen berbasis digital melalui pemanfaatan aplikasi seperti SITREN, yang secara keseluruhan dapat mendorong peningkatan tata kelola pesantren yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing.

23) Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu (1) Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi mencapai 66,66%, (2) Persentase satuan pendidikan yang

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran mencapai 100%, (3) Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler mencapai 100%.

Indikator Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai karakter telah diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran pada satuan pendidikan. Integrasi pendidikan karakter tidak hanya dilihat sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai bagian inheren dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Capaian indikator ini dinilai berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan pendidikan karakter secara terstruktur, yang dibuktikan melalui dokumen perencanaan pembelajaran (RPP/Modul Ajar), kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler, serta praktik pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai karakter seperti religius, integritas, disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, dan gotong royong.



Gambar 40 Penanaman Nilai Religius

Analisis manajemen menunjukkan bahwa peluang penguatan pendidikan karakter didukung oleh kebijakan nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), keselarasan dengan nilai moderasi beragama, serta peran strategis guru sebagai teladan dalam pembentukan karakter peserta didik. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa integrasi pendidikan karakter yang belum sepenuhnya implementatif (masih bersifat administratif), perbedaan pemahaman guru dalam penerapan konsep pendidikan karakter, serta keterbatasan dalam mengukur dampak karakter yang bersifat kualitatif. Berdasarkan perbandingan capaian target, pada periode sebelumnya implementasi pendidikan karakter masih berfokus pada aspek perencanaan dan dokumentasi, sedangkan pada periode berjalan menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana satuan pendidikan tidak hanya

mengintegrasikan dalam dokumen, tetapi juga telah menerapkannya secara lebih nyata dan konsisten dalam proses pembelajaran serta budaya sekolah.

24) Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal mencapai 100%, (2) Persentase guru yang meningkat jenjang karir mencapai 100%.

(1) Persentase guru yang meningkat jenjang karir

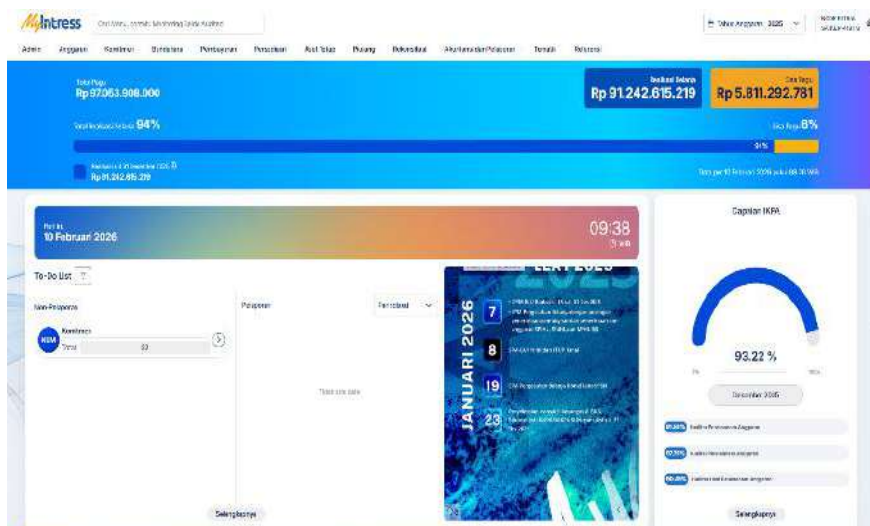
Secara manajerial, capaian realisasi kinerja sebesar 100% pada indikator persentase guru yang mengalami peningkatan jenjang karier pada beberapa madrasah menunjukkan keberhasilan perencanaan, pembinaan, dan fasilitasi pengembangan karier guru. Kendala yang dihadapi antara lain perbedaan kesiapan administrasi dan pemenuhan persyaratan kenaikan jenjang karier, keterbatasan pemahaman sebagian guru terhadap mekanisme pengembangan karier, serta keterbatasan waktu pendampingan. Namun demikian, capaian ini membuka peluang strategis untuk memperkuat sistem pembinaan karier guru secara berkelanjutan, meningkatkan motivasi dan profesionalisme pendidik, serta mendorong pemerataan peningkatan jenjang karier guru di seluruh madrasah melalui manajemen kepegawaian yang lebih terstruktur dan berbasis data.

Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 pada indikator persentase guru yang meningkat jenjang karier menunjukkan peningkatan dan konsistensi capaian kinerja. Pada Tahun 2024, target peningkatan jenjang karier guru telah tercapai sesuai perencanaan, meskipun cakupan madrasah dan jumlah guru yang terfasilitasi masih terbatas. Evaluasi capaian Tahun 2024 tersebut menjadi dasar penguatan kebijakan dan penetapan target Tahun 2025 yang lebih terukur dan merata. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan peningkatan efektivitas pembinaan, pendampingan administrasi, serta manajemen pengembangan karier guru. Capaian ini menjadi landasan untuk memperluas dan mempertahankan peningkatan jenjang karier guru secara berkelanjutan pada periode berikutnya.

25) Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Sasaran kegiatan ini mencakup 1 indikator kinerja, yaitu Nilai Kinerja Anggaran yang mencapai 104%. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang tercermin dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan target nilai sebesar 90, realisasi IKPA mencapai 93,67 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 104%. Nilai IKPA tersebut menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal, yang diukur melalui berbagai aspek seperti kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta kualitas pelaporan keuangan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah mampu mengelola anggaran secara akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keberhasilan dalam mempertahankan nilai IKPA di atas target juga didukung oleh konsistensi dalam monitoring dan evaluasi, peningkatan koordinasi internal, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, capaian Nilai Kinerja Anggaran dalam IKPA ini mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang berkualitas dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.



Gambar 41 Capaian IKPA pada myintress

26) Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 3 indikator kinerja, yaitu (1) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 104%, (2) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas mencapai 81,63%, (3) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar mencapai 100%.

(1) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian indikator Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan hasil pelaporan melalui aplikasi E-PIPK, realisasi tingkat maturitas SPIP mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 98%, sehingga capaian kinerja mencapai 102,04%. Hasil ini mencerminkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern telah berjalan secara efektif, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pada aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, maupun pemantauan intern. Keberhasilan ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta konsistensi dalam pelaporan dan evaluasi pengendalian intern. Dengan capaian tersebut, implementasi SPIP tidak hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pengelolaan keuangan serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

(2) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Capaian indikator Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih perlu ditingkatkan. Dari target yang ditetapkan sebesar 98%, realisasi yang dicapai sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 81,63%.

Pada tahun 2025, satuan kerja telah mengikuti proses pembangunan Zona Integritas dan memperoleh hasil penilaian pendahuluan tingkat Provinsi oleh Tim Penilai Pendahuluan Tingkat Provinsi (TPPP) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja pilot project WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Hal ini menunjukkan bahwa

upaya pembangunan Zona Integritas telah berjalan dan mendapatkan pengakuan awal, namun belum mencapai target optimal yang ditetapkan.

Realisasi yang belum memenuhi target disebabkan oleh masih adanya beberapa komponen pengungkit dan hasil yang perlu diperkuat, seperti pemenuhan eviden pada area perubahan, konsistensi implementasi reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Selain itu, proses penilaian Zona Integritas yang ketat dan berjenjang juga menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai nilai maksimal.

Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan progres positif sebagai langkah awal menuju predikat WBK. Ke depan, diperlukan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, peningkatan kualitas pemenuhan data dukung, serta optimalisasi implementasi program Zona Integritas agar capaian indikator dapat meningkat dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Penilaian Mandiri
Pembangunan Zona Integritas
menuju WBK & WBBM

Sasaran: Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartasagara

Perbaikan Evidence PMPZI Tahun 2025 (Status: Perbaikan 90 Tahun 2025)

No.	Komponen Pengungkit	Nilai	%	No.	Komponen Hasil	Nilai	%
1.	Manajemen Perubahan (4)	3.80	97.25%	1.	Struktur Birokrasi Akuntabel (35.3)	20.68	91.02%
2.	Penataan Tatakelola (3.5)	2.94	75.43%	2.	Pelayanan Publik Prima (17.5)	18.09	98.35%
3.	Pemetaan Sistem Manajemen Sdm Aparatur (5)	4.62	92.40%	TOTAL KOMPONEN HASIL (80)			
4.	Penguatan Akuntabilitas (5)	4.9	97.94%	INDEKS PMPZI SATUAN KERJA 88.29			
5.	Penguatan Pengembangan (7.5)	5.56	74.13%	Uraian Pembinaan 21 Secara Lengkap			
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5)	3.97	79.43%				
TOTAL ASPEK PEMERINTAHAN (30)		25.51	85.02%				
1.	Manajemen Perubahan (4)	3.76	94.00%				
2.	Penataan Tatakelola (3.5)	3	85.71%				
3.	Pemetaan Sistem Manajemen Sdm Aparatur (5)	4	80%				
4.	Penguatan Akuntabilitas (5)	2.96	59.20%				
5.	Penguatan Pengembangan (7.5)	7.5	100%				
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5)	5	100%				
TOTAL ASPEK REFORM (30)		25.21	84.04%				
TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT (60)		50.72	84.53%				

Gambar 42 Penilaian pada Aplikasi PMPZI 2025

SATUAN KERJA CALON PILOT PROJECT WBK TAHUN 2025 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARU																														
No.	SATUAN KERJA	MANAJEMEN PERUBAHAN (Nilai Mm: 4.00)		PENATAAN TATA LAYANAN (Nilai Mm: 4.00)		PENGUATAN SISTEM MONITORING (Nilai Mm: 5.00)		PENGUATAN AKUNTABILITAS (Nilai Mm: 5.00)		PENGUATAN PENGANGKARAN (Nilai Mm: 4.00)		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Nilai Mm: 5.00)		JUMLAH	TOTAL (Pm)	CAPIAN KUALITAS TAHUN 2025	Keterangan	REVISI												
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L																	
1.	Kantor Wilayah	8	4	4	8	7	2.53	5.88	10	4.23	4.25	8.48	10	5	4.51	9.52	15	6.09	7.3	14.19	10	4.75	9.55	9.58	27.2	27.22	54.42	115.08%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.00%
2.	Kantor Kecamatan	8	3.33	3.42	4.75	7	3.31	3.33	6.54	10	4.68	5	6.68	10	5	6	15	9.8	9.84	11.34	10	5.90	4.50	9.05	35.88	35.88	81.86	160.07%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.00%
3.	MAN K. Pesisir	8	2.27	4	7.27	7	2.28	2.5	5.68	10	4.44	3	7.44	20	5	4.51	9.52	15	1.19	8.88	12.67	10	4.38	4.54	20.14	25.07	51.23	102.04%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.00%
4.	Kantor Kecamatan	8	4	4	8	3	5.5	6	6.5	10	4.69	3	7.69	50	5	5.5	9.5	15	4.4	1.25	11.85	10	4.5	7.55	22.89	21.38	49.25	100.00%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.00%
5.	MAN K. Kuala	8	3.63	4	7.63	7	3.6	3.37	6.87	10	3.63	5.5	6.05	10	4.74	4	9.74	15	5.81	3.88	8.76	10	4.25	9.25	33.75	21.75	55.49	111.17%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.17%
6.	MAN Bontang	8	3.28	5	6.88	7	3.31	3.87	10	4.12	3.25	6.37	10	5	4.51	9.52	15	5.76	4.68	10.38	10	4.05	4.85	34.83	31.88	66.73	105.16%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.16%	
7.	Kantor Kecamatan	8	2.63	5.13	7	2.6	3.27	5.77	10	4.6	3.5	6.1	20	5	4	9	15	6.26	5.88	12.23	10	4.14	3.75	7.1	25.22	29.62	102.00%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.00%	
8.	Kantor Kecamatan	8	4	2.67	6.67	7	2.27	2.5	4.77	10	3.82	2.25	6.07	50	5.80	4.51	9.4	15	4.59	1.88	11.87	10	5.84	6.4	22.83	22.83	44.18	100.76%	Memenuhi Syarat	Seluruh Aspek Memenuhi 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.76%
9.	Kantor Kecamatan	8	5	3.47	7.47	7	2.88	4.87	10	4.58	3.5	5.88	10	4.17	4.51	9.68	15	6.06	2.25	4.91	10	1.73	3.25	3.53	31.01	18.18	86.2	102.00%	Tidak Memenuhi Syarat	4 Aspek Tidak Memenuhi Syarat, Penguatan Sistem Manajemen, Penguatan Pengembangan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, 14 Nilai Minimal (80%) dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Memcapai 125.00%

Gambar 43 Penilaian Pendahuluan oleh Tim TPP Kanwil Kemenag Prov Kaltim

(3) Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar

Capaian indikator Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar pada SIPKA menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 98%, realisasi capaian berhasil mencapai 100%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 102,04%. Hal ini menunjukkan bahwa satuan kerja telah menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Kinerja Anggaran (SIPKA).

Keberhasilan ini mencerminkan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan satuan kerja terhadap ketentuan penyusunan laporan kinerja yang berkualitas, tepat waktu, dan terstandar. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPKA turut mendukung proses penyusunan, penginputan, dan pelaporan kinerja secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Dengan capaian tersebut, kualitas laporan kinerja yang dihasilkan menjadi lebih akuntabel dan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ke depan, upaya peningkatan kualitas substansi laporan serta konsistensi pemenuhan standar pelaporan perlu terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih.

No.	Tahun Laporan Kinerja	Nama Laporan Kinerja	Keterangan	Tgl. Submit	Hasil Verifikasi
1	2023	Laporan Kinerja Tahun 2023	Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2023	24/01/2024	Valid Tgl. Penawaran: 22/01/2024 Hasil Penawaran: 20/01/2024 Laporan Kinerja: 20/01/2024
2	2024	Laporan Kinerja Tahun 2024	Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Tahun 2024	24/01/2024	Valid Tgl. Penawaran: 22/01/2024 Hasil Penawaran: 20/01/2024 Laporan Kinerja: 20/01/2024

Gambar 44 Pelaporan Kinerja pada SIPKA

27) Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 104%, (2) Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

mencapai 100% , (3) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu mencapai 102,04%, (4) Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) mencapai 101%.

(1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada satker Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik dan efektif. Hal ini tercermin dari capaian realisasi anggaran sebesar Rp94.842.757.064 dari total pagu Rp101.248.130.000 atau sebesar 93,67%. Tingkat penyerapan tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran IKPA Tahun 2025 pada satker Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, diperoleh Nilai IKPA sebesar 87,03 dengan konversi bobot mencapai 100%. Nilai ini mencerminkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, khususnya pada aspek kualitas perencanaan anggaran yang mencapai nilai tinggi, serta kualitas pelaksanaan anggaran yang ditunjukkan melalui kinerja penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan UP/TUP yang relatif optimal. Selain itu, capaian output juga menunjukkan hasil yang cukup baik dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Secara keseluruhan, capaian IKPA ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran pada satker Sekretariat Jenderal telah berjalan akuntabel, efektif, dan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik..



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

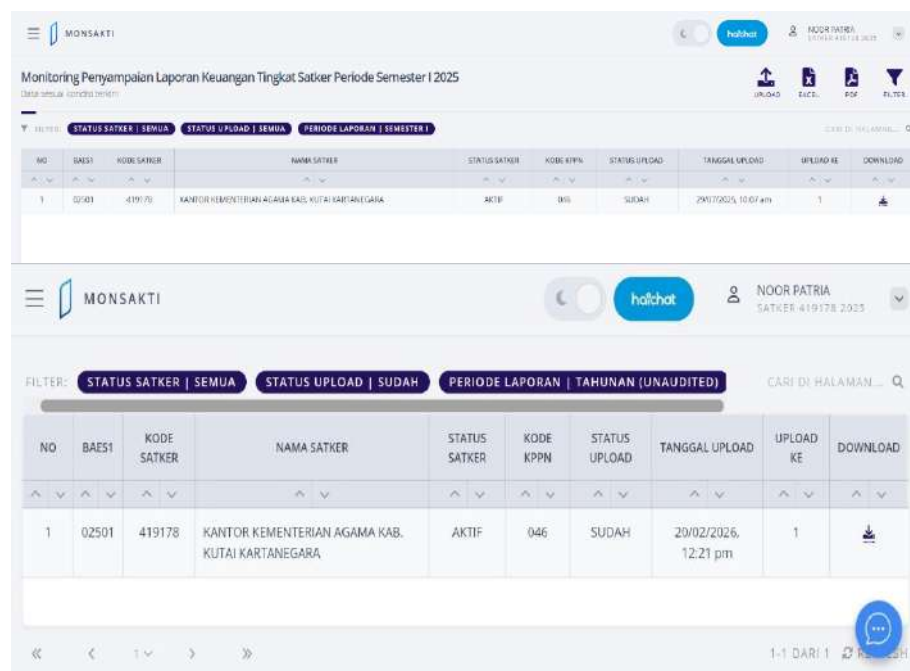
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Disipasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Haluan B/DPA	Penyerapan Anggaran	Berlaku Konstruktif	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian output				
1	345	025	419178	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Nilai	100.00	89.71	99.58	100.00	100.00	91.07	91.03	87.03	100%	0.00	87.03
					Bobot	10	10	20	10	10	10	20				
					Nilai Akhir	10.00	12.56	19.92	10.00	10.00	9.11	15.45				
					Nilai Aspek	91.80		97.00				91.82				

Gambar 45 Indikator Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal

- (2) Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu

Capaian indikator Laporan Keuangan Semester I dan Semester II yang disusun sesuai standar dan disampaikan tepat waktu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal dengan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini tercermin dari proses penyampaian laporan keuangan yang telah dilakukan melalui aplikasi MONSAKTI (Monitoring Sistem Akuntansi dan Kinerja Instansi) Kementerian Keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menunjukkan kepatuhan terhadap jadwal pelaporan serta kesiapan administrasi dan teknis satuan kerja.

Keberhasilan ini mencerminkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar pengelola keuangan. Selain itu, pemanfaatan sistem digital MONSAKTI turut meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional dan akuntabel serta perlu dipertahankan secara konsisten pada periode berikutnya.



NO	BAESI	KODE SATKER	NAMA SATKER	STATUS SATKER	KODE KPPN	STATUS UPLOAD	TANGGAL UPLOAD	UPLOAD KE	DOWNLOAD
1	02501	419178	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	AKTIF	046	SUDAH	20/02/2026, 10:07 am	1	

Gambar 46 Pelaporan Keuangan Semester 1&2 pada MONSAKTI

(3) Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu

Capaian indikator Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu pada tahun pelaporan menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan target sebesar 98% dan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 102,04%. Seluruh satuan kerja telah menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan, perencanaan yang matang, serta pengelolaan kebutuhan BMN yang lebih terarah dan sistematis. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi koordinasi internal, pemanfaatan sistem perencanaan berbasis elektronik, serta komitmen pengelola BMN dalam memastikan kesesuaian antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan prioritas program. Dengan demikian, capaian indikator ini menunjukkan efektivitas perencanaan BMN yang semakin baik dan menjadi landasan penting dalam mendukung tata kelola aset yang akuntabel dan berkelanjutan.

The screenshot displays the SIMAN interface for RKBMN management. The top section shows a timeline of RKBMN submissions from various units, including their status (e.g., 'Tgl Mula', 'Tgl Selesai', 'Status') and the responsible officer. The bottom section shows a table of RKBMN data with columns for 'No', 'Jenis Dokumen', 'Asal Dokumen', 'Nomor Dokumen', 'Masa Berlaku', and 'Kas'.

No	Jenis Dokumen	Asal Dokumen	Nomor Dokumen	Masa Berlaku	Kas
1	Surat Perintah	Sekretariat	18/12/2021/18/12/2021	18/12/2021/18/12/2021	1
2	Surat Perintah	Sekretariat	18/12/2021/18/12/2021	18/12/2021/18/12/2021	1
3	Surat Perintah	Sekretariat	18/12/2021/18/12/2021	18/12/2021/18/12/2021	1
4	Surat Perintah	Sekretariat	18/12/2021/18/12/2021	18/12/2021/18/12/2021	1

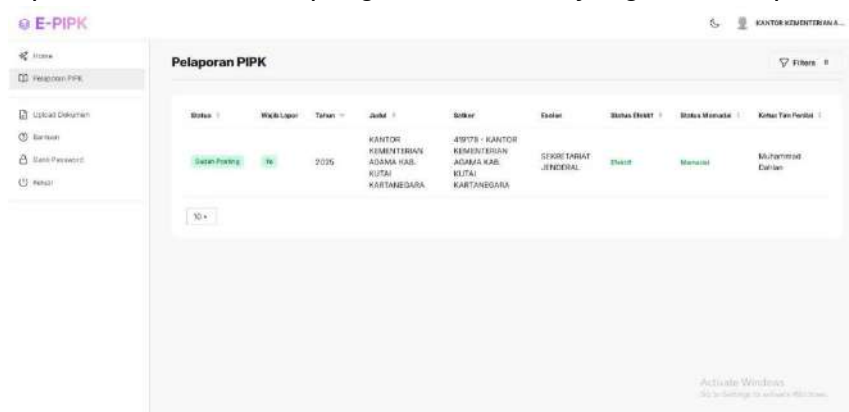
Gambar 47 Penyusunan RKBMN pada SIMAN

(4) Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)

Capaian indikator Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) pada tahun pelaporan menunjukkan hasil yang sangat optimal. Dengan target sebesar 99%, realisasi berhasil mencapai 100%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 101%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja telah menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran dan komitmen satuan kerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan andal. Implementasi PIPK yang baik turut didukung oleh penguatan fungsi pengawasan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan, serta pemanfaatan sistem aplikasi pelaporan yang terintegrasi.

Dengan capaian tersebut, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya, meminimalisir potensi kesalahan penyajian, serta mendukung terwujudnya opini laporan keuangan yang lebih baik. Ke depan, konsistensi penerapan PIPK perlu terus dijaga dan ditingkatkan guna mempertahankan kualitas pengendalian intern yang telah dicapai.



The screenshot shows the 'E-PIPK' application interface. The main section is titled 'Pelaporan PIPK'. It contains a table with the following columns: Status, Mekanisme, Tahun, Jarak, Sektor, Eksternal, Status Eksternal, Status Internal, and Keterangan. The table displays data for the year 2025, showing a status of 'Selesai' (Completed) for the 'KANTOR KEMENTERIAN ADANA KAB. KUTAI KARTANEGARA' and 'JABATAN KANTOR KEMENTERIAN ADANA KAB. KUTAI KARTANEGARA'. The status is 'Selesai' (Completed) for both 'Eksternal' and 'Internal' reports. The 'Keterangan' column indicates 'Keterangan: Diterima'.

Status	Mekanisme	Tahun	Jarak	Sektor	Eksternal	Status Eksternal	Status Internal	Keterangan
Selesai	Selesai	2025		KANTOR KEMENTERIAN ADANA KAB. KUTAI KARTANEGARA	JABATAN KANTOR KEMENTERIAN ADANA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Selesai	Selesai	Keterangan: Diterima

Gambar 48 Pelaporan E-PIPK

28) Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan mencapai 100%,

(1) Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan

Indikator kinerja Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini didukung dengan tersusunnya peta jabatan yang menggambarkan struktur organisasi, kebutuhan pegawai berdasarkan kelas jabatan, serta distribusi jabatan pelaksana dan fungsional sesuai dengan beban kerja masing-masing unit. Peta jabatan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan ASN secara terencana dan terukur. Selain itu, capaian ini juga didukung oleh adanya penambahan pegawai melalui pengadaan CPNS dan PPPK yang membantu pemenuhan kebutuhan SDM pada beberapa unit kerja strategis. Dengan target sebesar 80% dan realisasi mencapai 100%, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh satuan kerja telah memiliki perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Capaian ini mencerminkan bahwa perencanaan SDM telah berjalan optimal, mampu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, diperlukan pemutakhiran data kebutuhan pegawai secara berkala agar tetap selaras dengan dinamika organisasi dan kebijakan pengadaan ASN yang berlaku.



Телешағы, 11 Қызылорда (30)
Қарақ.

Gambar 50 Peta Jabatan 2025

Gambar 50 Peta Jabatan 2025

(2) Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi

Indikator kinerja Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi digunakan untuk mengukur persentase Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti proses pemetaan kompetensi dan memperoleh sertifikat sebagai bukti bahwa kompetensi yang dimiliki telah teridentifikasi sesuai standar yang ditetapkan. Pemetaan kompetensi ini bertujuan untuk mengetahui profil kompetensi ASN yang selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM, penempatan jabatan, serta peningkatan kinerja organisasi. Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 20% dengan realisasi mencapai 20%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemetaan kompetensi telah berjalan sesuai dengan target yang direncanakan, meskipun belum seluruh ASN dapat terfasilitasi karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan kuota peserta.

Selain itu, masih terdapat ASN yang belum mengikuti atau belum lulus proses pemetaan kompetensi. Kendala lain yang dihadapi antara lain belum meratanya pemahaman ASN terhadap pentingnya pemetaan kompetensi serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung asesmen. Meskipun demikian, hasil pemetaan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat signifikan berupa tersedianya data profil kompetensi ASN yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan SDM berbasis kompetensi.

Ke depan, peluang peningkatan indikator ini terbuka melalui dukungan kebijakan pengembangan SDM ASN, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam asesmen kompetensi, serta peningkatan sosialisasi kepada



ASN agar seluruh pegawai dapat mengikuti pemetaan kompetensi secara bertahap dan berkelanjutan.

29) Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Sasaran kegiatan ini terdiri dari 2 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase kasus hukum yang terselesaikan mencapai 100% (2) Persentase rekomendasi izin orang asing mencapai 100%.

(1) Persentase kasus hukum yang terselesaikan

Indikator persentase kasus hukum yang terselesaikan digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian kasus hukum yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menegakkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan pelanggaran. Kasus dinyatakan terselesaikan apabila telah memenuhi salah satu kriteria, yaitu telah ditetapkannya keputusan hukuman disiplin sesuai ketentuan, telah melalui proses pemeriksaan dan penjatuhan sanksi, atau telah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi instansi berwenang.

Pada Tahun 2025, target penyelesaian kasus hukum ditetapkan sebesar 99%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 99%, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus pelanggaran disiplin pegawai yang ditangani dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sistem penanganan pelanggaran disiplin telah berjalan dengan baik, didukung oleh proses pemeriksaan yang akuntabel, penerapan sanksi yang tepat, serta koordinasi yang efektif antar unit terkait. Selain itu, hal ini juga mencerminkan konsistensi organisasi dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN.

Dalam pelaksanaannya, secara umum tidak terdapat kendala yang signifikan. Namun demikian, terdapat beberapa potensi kendala yang perlu diantisipasi, antara lain lamanya proses klarifikasi dan pemeriksaan saksi, serta perlunya kehati-hatian dalam penjatuhan sanksi agar tetap objektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan, antara lain melalui penguatan budaya kerja disiplin dan

berintegritas, peningkatan pemahaman ASN terhadap hak dan kewajiban, serta pemanfaatan hasil penanganan kasus disiplin sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran organisasi.

Dengan capaian kinerja sebesar 100%, indikator ini menunjukkan bahwa penegakan disiplin pegawai telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pembinaan berkelanjutan, pengawasan internal yang lebih optimal, serta penguatan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis akuntabilitas dan transparansi.

(2) Persentase rekomendasi izin orang asing

Indikator Persentase Rekomendasi Izin Orang Asing digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian permohonan rekomendasi izin orang asing sesuai ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 99% dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan dinyatakan telah memenuhi bahkan melampaui target. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan dapat diproses secara tepat waktu, akurat, dan sesuai regulasi, didukung oleh koordinasi yang baik antar unit kerja serta ketelitian dalam verifikasi administrasi. Meskipun tidak terdapat kendala signifikan, masih terdapat potensi hambatan seperti kelengkapan dokumen pemohon dan dinamika regulasi, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

30) Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Sasaran kegiatan ini diukur melalui 2 indikator kinerja, yaitu (1) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses mencapai 102,04% (2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap mencapai 102,04%.

(1) Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

Indikator Persentase Digitalisasi Arsip dan Kemudahan Akses digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan arsip secara digital yang tertata, terdokumentasi, dan mudah diakses sesuai kebutuhan. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 98% dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 102,04% dan dinyatakan melampaui

target. Capaian ini menunjukkan bahwa proses digitalisasi arsip telah dilaksanakan secara optimal seiring dengan terus bertambahnya volume arsip yang dikelola dan disimpan dalam bentuk digital, yang didukung oleh pemanfaatan aplikasi SRIKANDI sebagai sistem pengelolaan arsip elektronik. Penggunaan aplikasi tersebut mendorong efisiensi dalam penyimpanan, pengelolaan, serta kemudahan temu kembali dokumen secara cepat dan terintegrasi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pengelolaan arsip yang tertib, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta kesadaran unit kerja dalam melakukan digitalisasi dokumen, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

NO	KODE KLASIFIKASI / NOMOR BERKAS	NAMA BERKAS	TANGGAL BUAT BERKAS	AKSI BERJENIS AKTIF	TOTAL BERJENIS	KLASIFIKASI KEAMANAN	AKSI
1	BA.01 / 1	Pemanggilan Peserta	13 Oktober 2025	-	3	Tembuka	  
2	BA.01 / 1	Pemohonan SKT	1 Juli 2025	-	5	Terbatas	  
3	BA.01 / 2	Arah Kiblat	14 Oktober 2025	-	5	Terbatas	  
4	BA.01 / 3	Rekomendasi Pembukaan Rekening	14 Oktober 2025	-	5	Terbatas	  

Gambar 51 Arsip Aktif pada Srikandi

(2) Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran yang Dikembangkan Berbasis Roadmap digunakan untuk mengukur tingkat perencanaan dan pengembangan kebutuhan sarana prasarana yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 98% dengan realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja sebesar 102,04% dan dinyatakan melampaui target. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan sarana dan prasarana perkantoran telah dilaksanakan secara optimal dan mengacu pada dokumen RKBMN sebagai roadmap perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara. Melalui RKBMN, proses pengadaan, pemeliharaan, dan

pengembangan sarana prasarana dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai prioritas kebutuhan organisasi. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan kualitas layanan perkantoran yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan kerja.

31) Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi

Sasaran kegiatan ini diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu (1) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID sebesar 102,04%, (2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama Republik Indonesia yang berhasil didiscounter sebesar 102,04%, serta (3) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasikan mencapai 120%. Berdasarkan perhitungan rata-rata dari ketiga indikator tersebut, diperoleh capaian kinerja sebesar 108,03%, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan sasaran kegiatan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kinerja yang efektif dalam pengelolaan informasi publik, pengendalian isu strategis, serta optimalisasi publikasi konten keagamaan dan pendidikan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

(1) Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID

Capaian kinerja Tingkat kematangan penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh aspek penilaian meliputi regulasi, pelayanan, standar operasional prosedur, serta infrastruktur telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini tercermin dari kejelasan struktur organisasi PPID yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang mengacu pada regulasi nasional, tersusunnya standar operasional prosedur layanan informasi publik (permohonan informasi, keberatan, dan sengketa informasi) yang telah dipublikasikan secara terbuka, serta terselenggaranya pelayanan informasi publik yang responsif terhadap berbagai permohonan data dari instansi pemerintah maupun lembaga masyarakat.



Gambar 52 Struktur Organisasi PPID Kankemenag Kukar

Dari aspek infrastruktur, ketersediaan website resmi ppid.kemenagkukar.id menjadi sarana utama dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik secara transparan, dimana informasi telah diklasifikasikan sesuai ketentuan menjadi informasi berkala, serta merta, dan setiap saat, serta dilengkapi dengan profil, regulasi, dan tata cara layanan. Capaian ini juga didukung oleh berbagai kegiatan penguatan kapasitas PPID, pemutakhiran dan klasifikasi Daftar Informasi Publik secara berkala, serta pengembangan sistem layanan berbasis digital yang lebih informatif dan responsif.

Secara manajerial, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya integrasi data antar unit, dan perlunya peningkatan pemahaman pegawai, namun telah dilakukan langkah perbaikan melalui penguatan koordinasi, penunjukan petugas pada masing-masing unit, serta optimalisasi media digital. Tahun 2025 menjadi tahun awal penguatan dan pengukuran kinerja PPID secara terstruktur, sehingga belum terdapat data pembandingan pada tahun sebelumnya, namun capaian ini telah menjadi baseline penting dalam pengembangan layanan informasi publik ke depan.

Selain itu, tidak adanya sengketa informasi publik selama tahun berjalan menjadi indikator tambahan bahwa mekanisme pelayanan informasi telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, capaian kinerja ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik serta menunjukkan

komitmen unit kerja dalam mewujudkan tata kelola informasi yang profesional dan berkelanjutan.



Gambar 53 Tampilan Webstie PPID Kemenag Kukar



Gambar 54 Penguatan Kapasitas SDM PPID 2025

(2) Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter

Capaian kinerja dihitung berdasarkan realisasi kegiatan yang mengintervensi indikator kinerja, yaitu persentase discounter pemberitaan negatif terhadap Kementerian Agama. Target yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 98%. Selama periode pelaporan, terdapat 2 (dua) pemberitaan negatif terkait Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh pemberitaan negatif tersebut telah ditindaklanjuti melalui langkah klarifikasi resmi, penyampaian informasi penyeimbang, serta penguatan narasi positif pada kanal komunikasi resmi instansi. Dengan demikian, seluruh pemberitaan negatif yang muncul berhasil dilakukan

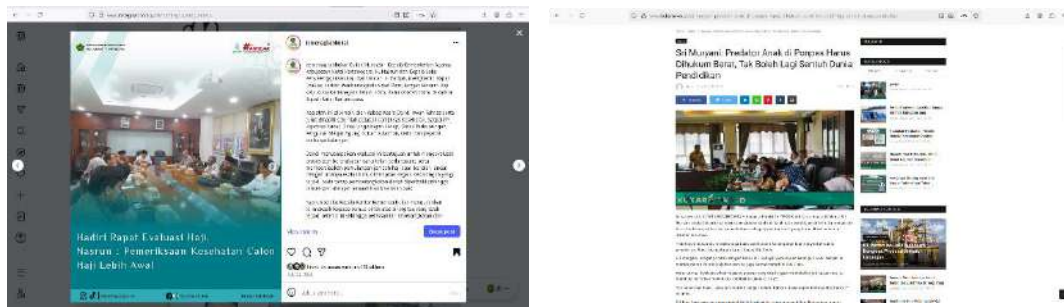
discounter, sehingga realisasi capaian kinerja mencapai 102,04% dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian indikator discounter pemberitaan negatif pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang konsisten dan stabil. Pada Tahun 2024, capaian indikator telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2025 capaian kembali berada pada angka 100% bahkan melampaui target sebesar 98%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan komunikasi publik yang diterapkan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam menjaga citra positif instansi. Konsistensi capaian tersebut juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam merespons isu publik secara cepat, tepat, dan terukur, sehingga potensi pemberitaan negatif dapat diminimalisir secara optimal.

Dari sisi manajemen, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain dinamika opini publik di media sosial yang berkembang sangat cepat, kebutuhan akan kehati-hatian dalam penyusunan klarifikasi agar tetap akurat dan tidak menimbulkan polemik baru, serta adanya potensi penyebaran informasi yang belum terverifikasi dari sumber tidak resmi. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang strategis, di antaranya pemanfaatan berbagai kanal komunikasi digital resmi untuk merespons isu secara cepat, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dari sumber terpercaya, serta optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi publik dan penguatan citra positif instansi.

Selain capaian utama tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara juga menunjukkan kinerja pendukung yang signifikan, seperti konsistensi dalam publikasi kegiatan melalui website dan media sosial resmi, peningkatan kualitas konten yang lebih informatif dan edukatif, percepatan respons terhadap isu yang berkembang di masyarakat, serta penguatan koordinasi internal dalam pengelolaan informasi publik. Secara keseluruhan, capaian ini tidak hanya memperkuat reputasi kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.





Gambar 55 Discounter Pemberitaan

(3) Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

Indikator kinerja ini diukur berdasarkan persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasikan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah konten pada tahun sebelumnya. Metode pengukuran ini mengacu pada prinsip pengukuran kinerja dalam dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam kerangka Rencana Strategis (Renstra), yaitu dengan membandingkan realisasi capaian output tahun berjalan terhadap baseline tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2024, jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasikan sebanyak 16 konten. Pada Tahun 2025, jumlah tersebut meningkat menjadi 75 konten. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 369%. Target peningkatan yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 20%. Dengan realisasi peningkatan sebesar 369%, maka capaian kinerja indikator ini mencapai 120% dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, yang mencatat target peningkatan sebesar 18% dengan realisasi 16 konten, maka pada Tahun 2025 terjadi akselerasi yang sangat signifikan, baik dari sisi kuantitas maupun efektivitas publikasi. Peningkatan target pada tahun berjalan juga diikuti dengan peningkatan kapasitas produksi konten yang jauh melampaui target. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan media sosial dan kanal digital sebagai sarana publikasi, serta peningkatan koordinasi internal dalam penyediaan bahan dan pengelolaan konten. Selain itu, adanya komitmen untuk meningkatkan intensitas publikasi turut mendorong tercapainya kinerja yang sangat baik pada indikator ini.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain dinamika informasi digital yang sangat cepat sehingga menuntut kecepatan publikasi agar konten tetap relevan, keterbatasan





Gambar 57 Peningkatan SDM Kehumasan 2025

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 mengalami beberapa kali revisi pada tiap satuan kerja (satker) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Satker Sekretariat Jenderal Nomor DIPA : SP DIPA-025.01.2.419178/2025 tanggal 02 Desember 2024 mengalami revisi sebanyak 14 kali dengan pagu anggaran Rp 97.053.908.000 (Sembilan puluh tujuh miliar lima puluh tiga juta Sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- b) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor DIPA : SP DIPA-025.03.2.419179/2025 tanggal 02 Desember 2024 mengalami revisi sebanyak 9 kali dengan pagu anggaran Rp 2.669.647.000 (dua miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- c) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Satker Ditjen Pendidikan Islam dengan Nomor DIPA : SP DIPA-025.04.2.419180/2025 tanggal 02 Desember 2024 mengalami revisi sebanyak 8 kali dengan pagu anggaran Rp 1.218.075.000 (satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Satker Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Nomor DIPA : SP DIPA-025.05.2.419181/2025 tanggal 02 Desember 2024 mengalami revisi sebanyak 4 kali dengan pagu anggaran Rp 134.450.000 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- e) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 Satker Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Nomor DIPA : SP DIPA-025.09.2.419186/2025 tanggal 02 Desember 2024

mengalami revisi sebanyak 4 kali dengan pagu anggaran Rp 172.050.000 (seratus tujuh puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan revisi terakhir pada tiap satker sesuai yang tercantum pada table mencapai 93,67% dari total pagu anggaran Rp 101.248.130.000. Realisasi tertinggi diperoleh pada Satker Ditjen Bimas Kristen mencapai 99,11% dengan pagu anggaran sebesar Rp 134.450.000. sementara itu nilai pagu tertinggi pada Satker Sekretariat Jenderal dengan pagu sebesar Rp 97.053.908.000 dengan realisasi mencapai 94.01%.

Gambar 59 menunjukkan bahwa 93,81% anggaran untuk keperluan belanja pegawai yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah pegawai pada seluruh satker yang mencapai total 641 pegawai terdiri dari 384 PNS dan 257 PPPK. Belanja pegawai ini tidak menanggung belanja pegawai CPNS formasi pusat dan IKN yang ditugaskan sementara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan total anggaran di atas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara telah merealisasikan anggaran yang ada sebesar **Rp 94.842.757.064 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah)** atau jika dihitung dalam bentuk persentase maka capaian realisasi anggaran sebesar **93.67%** dari total seluruh anggaran yang tersedia.

Realisasi anggaran pada tahun 2025 pada Triwulan I mencapai 20.46% senilai Rp 20.718.753.890; Triwulan II mencapai 47.70% senilai Rp 44.241.262.675; Triwulan III mencapai 64.11% senilai Rp 64.907.567.945; dan Triwulan IV mencapai 93.67% senilai Rp 94.842.757.064,00. Berdasarkan gambar 59 dapat dipahami bahwa realisasi pada tiap triwulan meningkat secara stabil dengan peningkatan sekitar 20% pada tiap triwulannya dengan kenaikan terbesar pada triwulan IV sebesar 30%.

Realisasi anggaran pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,83% di mana pada tahun 2024 mencapai 99,51%. Penurunan realisasi disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi yaitu dengan adanya revisi anggaran.

Revisi anggaran pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap selaras dengan kebutuhan riil di lapangan serta kebijakan yang berlaku. Revisi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Salah satu penyebab utama revisi anggaran adalah adanya penerimaan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dana hibah ini dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang keagamaan yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam alokasi anggaran awal. Dengan adanya tambahan dukungan pendanaan ini, diperlukan penyesuaian struktur anggaran agar penggunaannya dapat tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

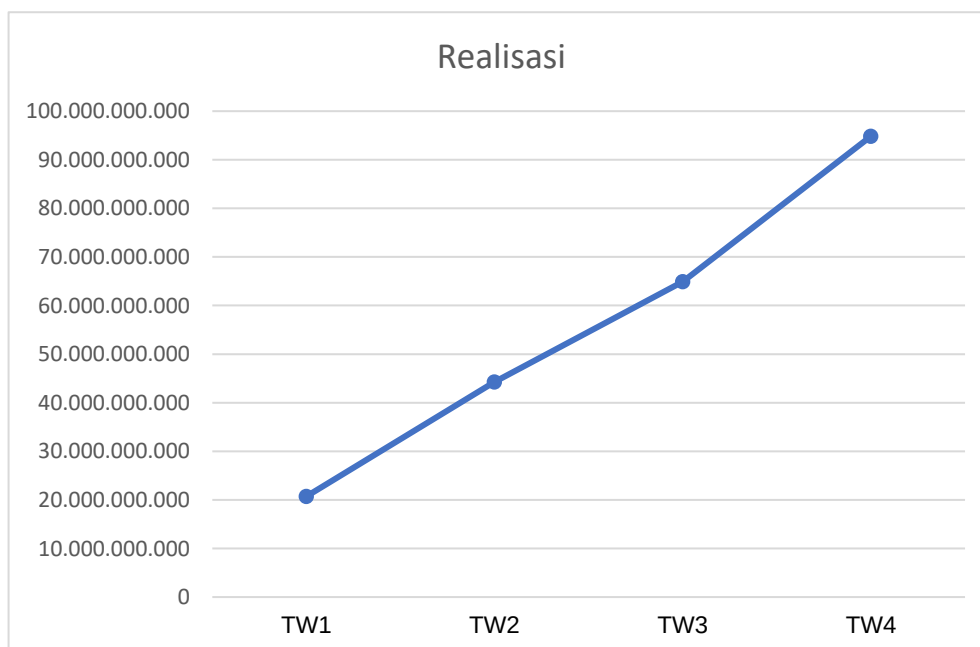
Selain itu, revisi anggaran juga dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan dan program pada masing-masing satuan kerja (satker). Dalam pelaksanaannya, terdapat dinamika kebutuhan yang berkembang sehingga memerlukan realokasi anggaran antar kegiatan maupun akun belanja agar pelaksanaan program tetap optimal dan target kinerja dapat tercapai.

Faktor lain yang menjadi penyebab revisi adalah adanya penyelesaian pagu minus pada beberapa satker. Kondisi pagu minus dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan realisasi kebutuhan riil, sehingga diperlukan langkah penyesuaian melalui revisi anggaran guna menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Revisi anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan dari penanggung jawab anggaran pada masing-masing satker. Dalam hal ini, pimpinan satker melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, kemudian menetapkan langkah-langkah strategis berupa pergeseran atau penyesuaian anggaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Di samping itu, kebijakan dari unit Eselon I turut menjadi faktor yang mempengaruhi revisi anggaran, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan alokasi anggaran pada masing-masing satker. Kebijakan tersebut umumnya berkaitan dengan prioritas nasional, optimalisasi capaian kinerja, serta penyesuaian terhadap arah kebijakan kementerian secara keseluruhan.

Dengan demikian, revisi anggaran yang dilakukan merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap adaptif, akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara optimal.



Gambar 58 Statistik Realisasi Anggaran 2025

SATKER	JENIS BELANJA	2024			2025		
		PAGU	REALISASI	SISA	PAGU	REALISASI	SISA
419178	Pegawai	78.334.521.000	78.295.982.078	38.538.922	93.992.969.000	88.185.797.598	5.807.171.402
	Barang	1.357.215.000	1.335.711.149	21.503.851	1.903.030.000	1.898.908.621	4.121.379
	Modal	99.351.000	99.351.000	-	1.157.909.000	1.157.909.000	-
TOTAL		79.791.087.000	79.731.044.227	60.042.773	97.053.908.000	91.242.615.219	5.811.292.781
419179	Pegawai	1.529.000.000	1.529.000.000	-	871.000.000	509.000.000	362.000.000
	Barang	2.351.294.000	2.003.657.000	347.637.000	1.798.647.000	1.598.227.600	200.419.400
	Modal	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3.880.294.000	3.532.657.000	347.637.000	2.669.647.000	2.107.227.600	562.419.400
419180	Pegawai	-	-	-	-	-	-
	Barang	1.050.180.000	1.047.176.834	3.003.166	956.253.000	941.075.396	15.177.604
	Modal	199.320.000	199.320.000	-	261.822.000	261.822.000	-
TOTAL		1.249.500.000	1.246.496.834	3.003.166	1.218.075.000	1.202.897.396	15.177.604
419181	Pegawai	203.000.000	198.500.000	4.500.000	117.000.000	117.000.000	-
	Barang	42.400.000	42.400.000	-	17.450.000	16.260.000	1.190.000
	Modal	-	-	-	-	-	-
TOTAL		245.400.000	240.900.000	4.500.000	134.450.000	133.260.000	1.190.000
419186	Pegawai	-	-	-	-	-	-
	Barang	161.265.000	161.265.000	-	172.050.000	156.756.849	15.293.151
	Modal	-	-	-	-	-	-
TOTAL		161.265.000	161.265.000	-	172.050.000	156.756.849	15.293.151

Gambar 59 Anggaran Per Jenis Belanja 2025

D. Perbaikan Perencanaan Program

Berdasarkan data dan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwa capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 100,74% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,67%, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya melakukan perbaikan secara berkala agar capaian kinerja dan anggaran dapat diraih secara optimal sebesar 100%. Untuk itu, beberapa langkah akan dilakukan di antaranya merencanakan target sasaran hingga indikator kinerja yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan secara optimal termasuk dalam pencatatan/dokumentasi terkait kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja pada tiap sasaran kinerja



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban yang akurat dan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja yang dibangun dari sebuah integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dilakukan setiap tahun. Maka atas dasar itulah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai sasaran program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yang dilakukan melalui perbandingan realisasi dengan target dalam perjanjian kinerja.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja kegiatan yang mencapai 100.74%. Dengan demikian pencapaian visi dan misi yang telah dilaksanakan melalui sasaran program dan kegiatan telah berhasil dengan sangat baik. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari pengaruh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal, seperti komitmen pimpinan, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan sarana prasarana, adanya peraturan dan kebijakan formal, alur kerja yang jelas, adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan instansi terkait, kondisi masyarakat yang kondusif, serta adanya pengawasan secara berkala oleh lembaga pengawasan baik internal maupun eksternal.

Upaya meningkatkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan yang harus mendapat perhatian yang serius. Peningkatan dan tuntutan ini terjadi karena berbagai hal, antara lain adanya perubahan peta politik dan pemerintahan, gencarnya keterbukaan informasi publik seiring dengan bergulirnya era reformasi, menguatnya arus globalisasi dan teknologi informasi, terjadinya perubahan perkembangan ekonomi, pertahanan dan keamanan, dinamika politik dan pembangunan, dan lain-lain. Akumulasi dari semua faktor tersebut secara intens telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kompleksitas permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berbagai kemajuan capaian dalam rentang waktu selama tahun 2025 dapat dijadikan pijakan untuk memantapkan peran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai fasilitator dan motivator pembangunan bidang agama dan

keagamaan. Berbagai upaya tersebut sangat membutuhkan dukungan dan keterbukaan dari seluruh komponen untuk bersama-sama memikul tugas dan fungsi yang mulia

A. Faktor Peluang

Keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai tujuan tidak terlepas dari adanya peluang yang dapat berfungsi sebagai pendorong untuk mempermudah jalannya organisasi. Adanya peluang memberi kesempatan kepada pemangku kebijakan untuk mengambil langkah sebagai strategi pengembangan organisasi secara lebih berkesinambungan. Koordinasi secara diagonal dengan lembaga terkait sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Faktor peluang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerjanya antara lain sebagaimana berikut ini.

1. Komitmen Pemerintah Daerah

Kebijakan Kepala Daerah dalam mendukung program Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam proses pencapaian program. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat penting bersinergi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan program-program keagamaan sehingga kehidupan beragama yang rukun dan harmonis dapat terwujud.

Peran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mensukseskan program/ kegiatan sesuai dengan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kegiatan Kankemenag Kutai Kartanegara yang bekerjasama dengan Pemkab. Kutai Kartanegara diantaranya pada penyelenggaraan MTQ, peringatan Hari Santri, bantuan ke FKUB Kabupaten dan lain-lain.

2. Dukungan Instansi Terkait

Keberhasilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencapaian program dan kegiatannya tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait. Dukungan yang diberikan kepada Kankemenag Kutai Kartanegara cukup besar, baik yang sifatnya berupa kegiatan maupun dalam bentuk koordinasi terhadap suatu isu/permasalahan.

Instansi/lembaga terkait langsung yang mendukung program agama dan keagamaan di Kalimantan Timur, antara lain :

- 
- a. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berperan dalam dukungan dengan mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD dan fasilitas lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan MTQ, Pesparawi, Peringatan Hari Santri, dan lain-lain dengan skema pendanaan berupa hibah maupun langsung dikelola oleh Pemkab. Kutai Kartanegara.
 - b. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berperan dalam dukungan dengan mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD dan fasilitas lainnya untuk mitra utama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dalam membina kerukunan umat beragama di Kutai Kartanegara, yaitu FKUB Kutai Kartanegara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - c. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berperan dalam dukungan dengan mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBD dan fasilitas lainnya untuk kelancaran penyelenggaraan haji terkait transportasi dan konsumsi kegiatan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji Reguler Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait dengan kerjasama dalam pengawalan transportasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji.
 - e. Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, terkait dalam kerjasama pengamanan dan pengawalan penyelenggaraan haji serta berperan aktif dalam pengawasan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh isu agama.
 - f. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur, terkait dengan dukungan dan kerjasama dalam mensosialisasikan dan menyampaikan makna istithoah dalam ibadah haji kepada masyarakat Kutai Kartanegara, khususnya Jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2025.
 - g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menjalin kerjasama yang baik dengan Pemkab. Kutai Kartanegara, lembaga dan instansi lain di Kutai Kartanegara serta stakeholder di Kutai Kartanegara dalam memberikan layanan petugas pembaca doa dan rohaniwan semua agama resmi.
 - h. Dukungan dan koordinasi dari Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kutai Kartanegara terkait dengan kerjasama dalam pengumpulan, pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh ASN instansi se Kutai Kartanegara.
 - i. Dukungan dari Badan Wakaf Indonesia, terkait dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 

- j. Dukungan dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, terkait dengan pengembangan Al Quran, Qori Qoriah dan dewan hakim di Kutai Kartanegara.
- k. Dukungan dan koordinasi dari Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, terkait dengan data dan informasi Ormas Keagamaan serta sosialisasi pencegahan radikalisme di Kalimantan Timur.
- l. Dukungan dan koordinasi dari Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara dalam proses percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Masyarakat yang Kondusif

Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara dalam hal isu keagamaan dapat digolongkan sangat kondusif. Hal ini dibuktikan dengan, salah satunya, Pembangunan Vihara Buddhayana Buddhis Center Tenggarong di mana penganut agama Buddha merupakan minoritas di Kutai Kartanegara namun mendapat banyak dukungan dari masyarakat dan Pemkab. Kutai Kartanegara. Meski demikian bukan berarti potensi konflik tidak ada, akan tetapi berkat kerjasama yang baik dari berbagai unsur dan elemen di Kalimantan Timur, baik dari unsur pemerintah, TNI dan POLRI, unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur organisasi masyarakat sehingga potensi konflik tersebut dapat diminimalisir. Kewaspadaan tetap harus ditingkatkan sebagai upaya pencegahan dini sebelum terjadinya konflik.

Kondisi yang kondusif ini tentu sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam upaya mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja strategis guna mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan Kementerian Agama melalui Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Faktor Tantangan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara selain mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, juga menghadapi beberapa kendala yang kemudian dijadikan sebagai faktor tantangan, baik dari faktor eksternal maupun dari faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor tantangan yang berasal bukan dari lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana di antaranya sebagai berikut :

- a. Faktor Kondisi Geografis

Wilayah geografis Kutai Kartanegara berbatasan dengan Kabupaten Malinau Prov. Kalimantan Utara, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan, serta Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Luas total wilayah Kutai Kartanegara adalah 27.263,10 km². Secara demografi penyebaran penduduk Kutai Kartanegara tersebar di wilayah yang saling berjauhan antara satu dengan lainnya. Untuk menjangkau seluruh wilayah Kutai Kartanegara memerlukan biaya yang cukup besar serta waktu yang panjang, bahkan dengan tingkat kesulitan yang tinggi pula, transportasi yang dipergunakan antar wilayah di Kutai Kartanegara dengan kendaraan darat dan sungai.

Kondisi geografis ini juga mempengaruhi pelaksanaan beberapa program Kankemenag Kab. Kutai Kartanegara yang sifatnya layanan kepada masyarakat sampai ke pelosok daerah. Salah satunya dalam penyelenggaraan haji di Kutai Kartanegara, khususnya yang terkait dengan pembinaan Jemaah Haji. Visitasi yang dilakukan kepada Jemaah Haji di seluruh wilayah Kutai Kartanegara memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang cukup besar, mengingat masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan internet yang stabil untuk mengikuti bimbingan manasik haji secara online.

Visitasi yang dilakukan untuk keperluan haji baik pendataan maupun manasik, dilakukan pada tiap kecamatan hingga kelurahan/desa di mana tidak semua wilayah memiliki akses jalan yang memadai/mudah, bahkan ada kecamatan yang harus menggunakan moda transportasi air untuk dapat sampai ke wilayah tersebut. Situasi geografis seperti ini membuat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara perlu selalu mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu sebelum melakukan perjalanan ke wilayah tersebut.

Hal yang sama juga menjadi tantangan pada program bidang-bidang selain penyelenggaraan haji yang harus menjangkau pelayanan kepada masyarakat di daerah seperti Pendidikan Madrasah, Pondok Pesantren, Pernikahan, dan lain-lain.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor tantangan yang berasal dari lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana di antaranya sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Alokasi Pagu Anggaran

Adanya keterbatasan alokasi pagu anggaran sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara yang memadai dari sisi fisik maupun lingkungan sekitar untuk memberikan kenyamanan, keindahan serta pelayanan dalam upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Ketersediaan data valid yang masih kurang

Data memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pimpinan/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini ketersediaan data yang valid dan mendukung pelaksanaan program-program Kantor Kementerian Agama Kab. Kutai Kartanegara dirasa masih belum optimal. Salah satunya dalam proses penyusunan perencanaan masih terdapat data siswa, data guru, dan data lembaga yang belum valid sehingga terjadi penganggaran yang tidak tepat.

Dalam kasus lain, data kependudukan untuk calon pengantin atau wali calon pengantin ataupun saksi terkadang bermasalah dikarenakan data tersebut tidak dapat divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Penguasaan IT yang masih kurang

Saat ini sebagian besar layanan publik di bidang agama dan keagamaan maupun aktivitas administrasi sudah berbasis digital karena mengikuti perkembangan teknologi digital yang semakin masif dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan berbagai percepatan secara digital dalam penyelesaian pekerjaan, mulai dari penggunaan aplikasi yang dibuat oleh Kemenag RI maupun pemanfaatan sumber daya digital lain yang dikelola secara mandiri. Aplikasi lain yang dibuat oleh instansi vertikal lain juga telah digunakan seperti contohnya aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan lain-lain.

Pekerjaan sehari-hari juga sudah akrab dengan teknologi digital, mulai dari absensi, penyusunan SKP, penomoran surat dan lain-lain. Semua hal ini harus didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan cukup untuk dapat secara optimal memanfaatkan IT dalam memudahkan pekerjaan. Namun, masih ada pegawai yang gagap teknologi yang mana hal ini akan menjadi

faktor penghambat/tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program. Selain faktor gagap teknologi, masih ada pegawai yang tidak cakap dalam pemanfaatan teknologi karena tidak adanya inisiatif dan tidak proaktif untuk meningkatkan kemampuan diri.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariyadi F

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abdul Khaliq

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 23 Desember 2025
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



Abdul Khaliq



Ariyadi F



Lampiran Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
1	Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16.9
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam	Persentase peningkatan audiens MTQ	79
		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	2
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	72
3	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	1
		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	80
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam	10.01
		Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	10
		Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	10
		Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	25.35
		Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	98
5	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	98
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam	1:5
6	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	1
		Persentase peningkatan naskah & buku	1
		Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	10

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
7	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf	Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam terintegrasi basis data terpadu nasional	0.5
		Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	11
		Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti	4
8	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	15
		Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	2
		Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	6
		Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	5
9	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	90
		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1:4
		Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan	60
10	Meningkatnya kualitas jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yg diberangkatkan sesuai kuota	5
11	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80
		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu	86
12	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase calon jemaah haji yg memperoleh sertifikat manasik haji	70
13	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid jiddan	95
14	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	13
		Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	26
		Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	1
		Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	80
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
15	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80
16	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1
		Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	10
		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80
		Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	95
17	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	20
		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	80
18	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional	66.80
		Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	70.30
		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	78.00
19	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	5
20	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase MI yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase MA yang terakreditasi minimal B	80
		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5
21	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90
		Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	30
		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	10

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
		Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	95
		Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	12.00
22	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	95
23	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80
		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	98
		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	1
24	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95
		Persentase guru yang meningkat jenjang karir	7
25	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Nilai Kinerja Anggaran	90
26	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	98
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	98
		Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	98
		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	98
		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,83
27	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,10
		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	99
		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2
		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	98
		Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	99
28	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan,	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	80

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target
	pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	20
29	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	99
		Persentase rekomendasi izin orang asing	98
30	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	98
		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	98
31	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	98
		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	98
		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	20

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
	2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian	5.250.000
	2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	21.502.267.000
	2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	4.500.000
	2103 Pembinaan Administrasi Umum	496.950.000
	6708 Dukungan Manajemen Pendidikan	72.597.296.000
	2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	676.779.000
	2135 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	467.325.000
	2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	5.000.000
	5100 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	12.450.000
	2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	141.786.000
2	PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	
	5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	80.000.000
	2104 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	765.133.000
	2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	16.499.000
	2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	976.845.000
	2124 Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	37.187.000
	2137 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	83.000.000
	2126 Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	1.360.000
	2147 Pembinaan Haji dalam Negeri	19.328.000
	2148 Pembinaan Haji	9.576.000
3	PROGRAM KUALITAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN	
	4434 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	34.000.000
4	PROGRAM PAUD DAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN	
	2129 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	750.750.000

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
	JUMLAH SELURUH	98.683.281.000

Kepala Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Timur,



Abdul Khaliq

Samarinda, 23 Desember 2025
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ariyadi F



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	025	419178	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Nilai	100.00	83.71	99.58	100.00	100.00	91.07	61.82	87.03	100%	0.00	87.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.56	19.92	10.00	10.00	9.11	15.45				
					Nilai Aspek	91.86		97.66				61.82				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	025	419180	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Nilai	100.00	72.26	100.00	100.00	100.00	87.09	96.70	93.72	100%	0.00	93.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.84	20.00	10.00	10.00	8.71	24.17				
					Nilai Aspek	86.13		96.77				96.70				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	025	419179	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Nilai	100.00	55.32	88.90	0.00	0.00	98.83	83.80	66.91	80%	0.00	83.64
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.30	17.78	0.00	0.00	9.88	20.95				
					Nilai Aspek	77.66		93.87				83.80				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	025	419186	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Nilai	100.00	66.29	98.89	0.00	100.00	99.52	70.18	77.22	90%	0.00	85.80
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.94	19.78	0.00	10.00	9.95	17.55				
					Nilai Aspek	83.15		99.47				70.18				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	025	419181	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	Nilai	100.00	49.46	98.14	0.00	0.00	0.00	100.00	62.05	70%	0.00	88.64
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.42	19.63	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	74.73		98.14				100.00				



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	419186 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	172,050,000 156,756,849 (91.11%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	172,050,000 156,756,849 (91.11%)
		SISA	0	15,293,151	0	0	0	0	0	0	0	15,293,151
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	172,050,000 156,756,849 (91.11%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	172,050,000 156,756,849 (91.11%)
		SISA	0	15,293,151	0	0	0	0	0	0	0	15,293,151



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	419178 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	PAGU	93,992,969,000	1,903,030,000	1,157,909,000	0	0	0	0	0	0	97,053,908,000
		REALISASI	88,185,797,598 (93.82%)	1,898,908,621 (99.78%)	1,157,909,000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91,242,615,219 (94.01%)
		SISA	5,807,171,402	4,121,379	0	0	0	0	0	0	0	5,811,292,781
GRAND TOTAL		PAGU	93,992,969,000	1,903,030,000	1,157,909,000	0	0	0	0	0	0	97,053,908,000
		REALISASI	88,185,797,598 (93.82%)	1,898,908,621 (99.78%)	1,157,909,000 (100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	91,242,615,219 (94.01%)
		SISA	5,807,171,402	4,121,379	0	0	0	0	0	0	0	5,811,292,781



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	419179 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	PAGU	871,000,000	1,798,647,000	0	0	0	0	0	0	0	2,669,647,000
		REALISASI	509,000,000 (58.44%)	1,598,227,600 (88.86%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2,107,227,600 (78.93%)
		SISA	362,000,000	200,419,400	0	0	0	0	0	0	0	562,419,400
GRAND TOTAL		PAGU	871,000,000	1,798,647,000	0	0	0	0	0	0	0	2,669,647,000
		REALISASI	509,000,000 (58.44%)	1,598,227,600 (88.86%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	2,107,227,600 (78.93%)
		SISA	362,000,000	200,419,400	0	0	0	0	0	0	0	562,419,400



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	419180 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	PAGU REALISASI	0 0.00%	956,253,000 941,075,396 (98.41%)	261,822,000 261,822,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,218,075,000 1,202,897,396 (98.75%)
		SISA	0	15,177,604	0	0	0	0	0	0	0	15,177,604
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	956,253,000 941,075,396 (98.41%)	261,822,000 261,822,000 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,218,075,000 1,202,897,396 (98.75%)
		SISA	0	15,177,604	0	0	0	0	0	0	0	15,177,604



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	419181 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA	PAGU	117,000,000	17,450,000	0	0	0	0	0	0	0	134,450,000
		REALISASI	117,000,000 (100.00%)	16,260,000 (93.18%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	133,260,000 (99.11%)
		SISA	0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000
GRAND TOTAL		PAGU	117,000,000	17,450,000	0	0	0	0	0	0	0	134,450,000
		REALISASI	117,000,000 (100.00%)	16,260,000 (93.18%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	133,260,000 (99.11%)
		SISA	0	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000



**KEMENTERIAN AGAMA
LAMPIRAN I**

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Kode/Nama Satker	:	419178/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KUTAI KARTANEGARA
Perjanjian Kinerja	:	Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
Periode	:	Triwulan IV Tahun 2025

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA (%)	KET.	DATA DUKUNG EVIDENCE (LINK GOOGLE DRIVE)
			KINERJA	ANGGARAN (Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp)			
1	Terlaksananya KUA sebagai pusat cegah konflik Agama	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	16.9	0	100	-	120%	Seluruh KUA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan EWS	https://docs.google.com/document/d/174IO-NfuzUgoU23U0iLv3_3ic9HzcuPI/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
2	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga dan Syiar Agama Islam	Persentase peningkatan audiens MTQ	79	0	79	-	100%	Berdasarkan pelaksanaan event MTQ tahun 2025	https://docs.google.com/document/d/1G_Q3n1jmxOCAnPiyMptdV4N1CQLPWdzH/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
3		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama Islam	2	0	2	-	100%	Berdasarkan pelaksanaan event MTQ tahun 2025	https://docs.google.com/document/d/1G_Q3n1jmxOCAnPiyMptdV4N1CQLPWdzH/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
4		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	72	0	72	-	100%	Berdasarkan lembaga agama yang telah menerima pendampingan/pembinaan tata kelola kelembagaan	https://docs.google.com/document/d/1G_Q3n1jmxOCAnPiyMptdV4N1CQLPWdzH/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
5		Persentase peningkatan peserta event seni budaya agama	1	0	1	-	100%	Berdasarkan event seni budaya agama	https://docs.google.com/document/d/1R9H0Rd85XDdt3dVclIOEPLTF7bwzX9JD/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
6		Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	80	0	40	-	50%	Berdasarkan lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	https://docs.google.com/document/d/1TWim2iofA4SDrwUsavTWjvY9hTf3INqn/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Presentase calon pengantin yang mendapat Bimbingan Perkawinan Agama Islam	10.01	0	98	-	120%	Berdasarkan catin yang mengikuti Bimwin sampai TW4	https://docs.google.com/document/d/1MZBjwT_zVeVQgWKZzJquGCBBIOMLJPC2/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true

8		Presentase remaja usia sekolah yang memperoleh bimbingan pra nikah	10	0	10	-	100%	Berdasarkan kursus pra nikah yang dilaksanakan sampai TW4	https://docs.google.com/document/d/1MZBjwT_zVeVQgWKZzJquGCBBIOMLJPC2/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
9		Presentase Rumah Tangga yang mendapatkan Bimbingan Keagamaan Keluarga Sakinah	10	0	10	-	100%	Berdasarkan kegiatan layanan keluarga sakinah pada KUA Piloting Revitalisasi sampai TW4	https://docs.google.com/document/d/1MZBjwT_zVeVQgWKZzJquGCBBIOMLJPC2/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
10		Presentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	25.35	0	94,44	-	120%	Berdasarkan pengadaan muebelair (meja dan kursi) KUA tahun 2025	https://docs.google.com/document/d/1MZBjwT_zVeVQgWKZzJquGCBBIOMLJPC2/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
11		Presentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	98	0	40,98	-	41,81%	Berdasarkan penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	https://docs.google.com/document/d/1MZBjwT_zVeVQgWKZzJquGCBBIOMLJPC2/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
12	Meningkatnya Kualitas Penyuluhan Agama Islam	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	98	0	100	-	102%	Penilaian Kinerja Penyuluh Agama Islam non ASN dinilai berdasarkan kehadiran melaksanakan tugas di KUA sebesar 20% dan Kinerja melaksanakan tugas kepenyuluhan dengan frekuensi kegiatan sebanyak 8 kali tatap muka sebesar 80%	https://docs.google.com/document/d/1Zxa1Ct0PtEXiyVS7bYYsUPisjy7_kgjY/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
13		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama islam	1:5		1:3	-	120%	Berdasarkan data penyuluh:kelompok sasaran	https://drive.google.com/file/d/1yQf_ybiMmQXyPdtc2I77tw9p4r4f5VtJ/view?usp=sharing
14	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Layanan Keagamaan Islam	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan	1	0	1	-	100%	Berdasarkan pendistribusian bantuan kitab suci Al-Qur'an kepada pengurus mushalla.	https://docs.google.com/document/d/1KL6ZCBbVy0yVuLEAm5TecXiPPwYzXKdu/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
15		Persentase peningkatan naskah & buku	1	0	1	-	100%	Berdasarkan jumlah buku yang didistribusikan sampai TW4	https://docs.google.com/document/d/1KL6ZCBbVy0yVuLEAm5TecXiPPwYzXKdu/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
16		Persentase Peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	10	0	10	-	100%	Berdasarkan peningkatan lembaga agama yang memperoleh manfaat layanan syariah dan hisab rukyat	https://docs.google.com/document/d/1KL6ZCBbVy0yVuLEAm5TecXiPPwYzXKdu/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
17	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf	Presentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan islam terintegrasi basis data terpadu nasional	0.5	0	0.5	-	100%	Berdasarkan data mustahik penerima dana zakat	https://docs.google.com/document/d/1Gt1MGfwP1TX9RuMarul3oiHQ7QiP2p6M/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
18		Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	11	0	11	-	100%	Berdasarkan kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf	https://docs.google.com/document/d/1NF0XRKR-xU5P5SecaJTuvcwS_PUd-9H/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true

19		Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yg ditindaklanjuti	4	0	-	-	100%	Tidak adanya pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti menunjukkan komitmen untuk meminimalisir bahkan meniadakan kasus yang	https://drive.google.com/file/d/1MZTBLG1dLJhGvScuXPEW--GZCuzUj6C/view?usp=sharing
20	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	15	0	100	-	120%	Berdasarkan 4 dari 4 lembaga yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	https://docs.google.com/document/d/1Hp5lDsRqHS9eMRKlbnkPm2ng3mXK_D2l/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
21		Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	2	0	2	-	100%	Berdasarkan lembaga wakaf yang sudah akuntabel sampai dengan TW4 2025	https://docs.google.com/document/d/15x_R58-j0Dyl7-Ou1jINxVArssllfZYm/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
22		Persentase layanan ijin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	6	0	-	-	100%	Tidak adanya proyeksi pembentukan lembaga baru di wilayah kerja	https://drive.google.com/file/d/1vp8tMTIhoW3HpRRnVOmKAu2vn_520L1l/view?usp=sharing
23		Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	5	0	5	-	100%	Seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku telah diproses dan diterbitkan secara tepat waktu.	https://drive.google.com/file/d/1hsVKR_BARjXt932fvV6TtMm9sWK3S5rx/view?usp=sharing
24	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan Kristen yg profesional, inklusif, dan berdampak	Presentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	90	0	100	-	111,11%	Berdasarkan Penyuluh Agama Yang Memperoleh Nilai Kinerja Berkategori Baik	https://docs.google.com/document/d/1ResfxALXSh7aHqHuarQLdY8U0tnLRPAk/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
25		Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yg mendapatkan bimbingan agama	1:4	0	1:4	-	100%	Berdasarkan Rasio Penyuluh Agama Dengan Kelompok Sasaran Yg Mendapatkan Bimbingan Agama	https://docs.google.com/document/d/1xWpq7SDA09dlxkB51Jb5XwQmDme9STx/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
26		Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan	60	0	50	-	83,33%	Berdasarkan jumlah layanan bimbingan keluarga yg disediakan	https://docs.google.com/document/d/1WJVVFyfJ36KVYHEfRQHCBfvG_eKisSO3/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
27	Meningkatnya kualitas jemaah haji	Persentase calon jemaah lansia yg diberangkatkan sesuai kuota	5		5		100%	Berdasarkan total kuota nasional dengan kriteria jemaah berusia 80 tahun keatas dan telah mendaftar minimal 5 tahun.	https://docs.google.com/document/d/1S5fyCHABLvmJ6qBoZPTroWAcgTFU3gSU/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
28	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Persentase pusat layanan haji dan umroh terpadu yg memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80	0	80	-	100%	Berdasarkan sarana dan prasarana yang tersedia	https://docs.google.com/document/d/1naE6ZvxMf8FiPYt-3Vwn89_afFB_Q0E/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
29		Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umroh terpadu	86	0	86	-	100%	Berdasarkan hasil pengisian survei kepuasan pelayanan di PLHUT Tahun 2025	https://docs.google.com/document/d/1P6eJ8VrtKakkDwiEHD0DggUDXXs307XN/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true

30	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase calon jemaah haji yg memperoleh sertifikat manasik haji	70	0	100	-	120%	Seluruh jamaah haji mengikuti manasik haji dan berhak menerima sertifikat	https://docs.google.com/document/d/1RL7gFUluNjMTyInnMkXWC32wmuxHy2Cz/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtfop=true&sd=true
31	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas	Persentase santri pesantren dan satuan pendidikan keagamaan yang lulus dengan predikat jayyid	95	0	70	-	73,68%	Berdasarkan data kelulusan santri	https://drive.google.com/drive/folders/1wzFrOjNcYF4aJ33J0g6D142z5Wu0HI-E?usp=drive_link
32	Meningkatnya sarana dan prasarana Madrasah yang berkualitas	Persentase madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	13	0	13	-	100%	Berdasarkan data madrasah yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	https://docs.google.com/document/d/19nDwwCTgmE0XY35AVYEW1gT5GU2Ua_t/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtfop=true&sd=true
33		Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	26	0	26	-	100%	Berdasarkan keanggotaan perwakilan setiap madrasah dalam forum pendidik madrasah inklusif	https://drive.google.com/drive/folders/1BRA5qDBxL_vqMzppFngC5QNblp2SqM7zu?usp=drive_link
34		Persentase peningkatan jumlah siswa madrasah pada satuan pendidikan	1	0	1	-	100%	Berdasarkan 141 Madrasah dan RA telah memenuhi pencapaian	https://drive.google.com/file/d/1NT37Lun4uQl9Lw5th6e-s8B1E3nadVQz/view?usp=sharing
35		Persentase Anak Kelas 1 MI yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	80	0	100	-	120%	Daftar Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD/RA	https://drive.google.com/file/d/1kwS4I5fBpmnRbW3mS6TyMf8_F5D0IRB/view?usp=sharing
36		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80	0	100	-	120%	Berdasarkan data madrasah yang mempunyai UKS	https://docs.google.com/document/d/1RueK2GMq7SHsZ5iEy2NypC9Ppv-xyPz0/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtfop=true&sd=true
37	Meningkatnya sarana dan prasarana Pesantren dan Satuan Pendidikan Keagamaan yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1	0	1	-	100%	Berdasarkan data pondok pesantren	https://docs.google.com/document/d/1km0euMKDt9WLPz9fX10TQkactUui59xd/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtfop=true&sd=true
38		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80	0	80	-	100%	Berdasarkan pondok pesantren yang menyediakan UKS	https://drive.google.com/drive/folders/1S96U01H0Eyy-1kIBZNIi5ygPIBvaMKA9?usp=drive_link
39	Meningkatnya pemerataan akses pendidikan keagamaan dan Pesantren yang berkualitas	Persentase peningkatan jumlah santri pada satuan pendidikan keagamaan	1	0	1	-	100%	Berdasarkan data pondok pesantren	https://docs.google.com/document/d/1UN5VTOm1gWHrT-JVSTb4gXmWxLNMffPx/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtfop=true&sd=true
40		Persentase Anak Kelas 1 Ula yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA)	10	0	100	-	120%	Daftar Anak Kelas 1 MI yang pernah mengikuti PAUD/RA	https://drive.google.com/file/d/1kwS4I5fBpmnRbW3mS6TyMf8_F5D0IRB/view?usp=sharing

41		Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	80	0	80	-	100%	Berdasarkan pondok pesantren yang menyediakan UKS	https://drive.google.com/drive/folders/1S96U01H0Eyy-1kIBZNli5ygPIBvaMKA9?usp=drive_link
42		Persentase siswa dalam satu kohort yang lulus tepat waktu	95	0	100	-	105%	Berdasarkan data kelulusan siswa	https://drive.google.com/drive/folders/1Ng1vnxdlu316Psw1ZPu05HxA9etpUy2x?usp=drive_link
43	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan madrasah	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80	0	80	-	100%	Berdasarkan data Ujian Madrasah	https://drive.google.com/drive/folders/1fEo0ev_nXQQnLoR64fJS_xoP8R3FhzPB?usp=drive_link
44		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80	0	100	-	120%	Berdasarkan Madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter	https://drive.google.com/file/d/1T3bWLuwSJfQWQIZYpWkBVfeKEEMbHxG/view?usp=sharing
45		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	20	0	20		100%	Berdasarkan jumlah siswa yang berprestasi pada tahun 2025	https://docs.google.com/document/d/1yCxzo_eMtnMWG_2Gy4sUfrd42JA_ds8e/edit?usp=sharing&oid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
46		Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	80	0	100	-	120%	Berdasarkan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan	https://docs.google.com/document/d/1YvPFjgY9bg_m-AFDUmoC4a6yWr16hzV/edit?usp=sharing&oid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
47	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan keagamaan dan pesantren	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional	66.80	0	44,53	-	66,66%	Berdasarkan hasil TKA PKPPS	https://drive.google.com/drive/folders/1_pBaUTtkJ-XXClcGqfkd8kJve0M0NukXj?usp=drive_link
48		Nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	70.30	0	70.30	-	100%	Berdasarkan penerapan nilai keberagamaan santri pada satuan pendidikan pesantren	https://drive.google.com/drive/folders/1WqAIJL2id7SPrPefdXV3ghprBni45iCd?usp=sharing
49		Rata-rata nilai penguatan moderasi beragama santri	78.00	0	78.00	-	100%	Berdasarkan penguatan moderasi beragama santri	https://drive.google.com/drive/folders/16GO0B4U3ZpgYjc-dqZ5xSHnRHFEW_BzM?usp=drive_link
50	Meningkatnya kualitas perangkat kurikulum	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	5	0	5	-	100%	Berdasarkan sampel materi ajar digital yang telah dibuat	https://docs.google.com/document/d/15YYZb6H-Rm2LUw0nwpriXMLBw8q5PQeE/edit?usp=sharing&oid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
51	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B	80	0	80	-	100%	Berdasarkan RA sekabupaten Kutai Kartanegara rata-rata telah mencapai akreditasi B	https://drive.google.com/file/d/1DAi28A9we_bTBomlvfWZV4xGJLi5RHe/view?usp=sharing

52		Persentase MI yang terakreditasi minimal B	80	0	80	-	100%	Berdasarkan MI sekabupaten Kutai Kartanegara rata-rata telah mencapai akreditasi B	https://drive.google.com/file/d/1-YqY4hfdARxwD0Vsk2jDs-arJEDc2q1R/view?usp=sharing
53		Persentase MTs yang terakreditasi minimal B	80	0	80	-	100%	Berdasarkan MTS sekabupaten Kutai Kartanegara rata-rata telah mencapai akreditasi B	https://drive.google.com/file/d/1wBzg_blsVfrU6oSMU7wk1A8FIxY0A/view?usp=sharing
54		Persentase MA yang terakreditasi minimal B	80	0	80	-	100%	Berdasarkan MA sekabupaten Kutai Kartanegara rata-rata telah mencapai akreditasi B	https://drive.google.com/file/d/11kAf0Jh2reCMSazkwkd_IW8FDgJmgNSe/view?usp=sharing
55		Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	5	0	5	-	100%	Berdasarkan kegiatan TKA yang dilakukan	https://docs.google.com/document/d/1Gb2gAKn8L1j3L98pTg3NnXRO-5fwryG/edit?usp=sharing&ouid=115002700366161584146&rtopof=true&sd=true
56	Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu	Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	90	0	100	-	111%	Berdasarkan santri yang telah mengikuti UAN PKPPS tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1YJ1SrB_eQDr9ib4n3Qfnv7h27LZ9orgO/view?usp=sharing
57		Persentase santri yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	1	0	1	-	100%	Berdasarkan data siswa yang mengikuti kompetisi	https://drive.google.com/drive/folders/1f1v5wEFHloyTMstGwNlxZpKbtUyYdMM?usp=drive_link
58		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	30	0	30	-	100%	Berdasarkan satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	https://drive.google.com/drive/folders/1SfZCuN7g6ga_aMZjq9FoTXenU5GjZB?usp=drive_link
59		Persentase satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	10	0	10	-	100%	Berdasarkan satuan Pendidikan pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	https://drive.google.com/drive/folders/10M2qmh3_AUHwcTSF55CZpDaQc1fr mzCP?usp=drive_link
60		Persentase pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	95	0	95	-	100%	Berdasarkan data pesantren yang menyelenggarakan program Pesantren berdaya berbasis sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan	https://drive.google.com/file/d/14apA086Yvf1YbWkN2g-UZz0wRiFXwCLD/view?usp=sharing
61		Persentase satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	12.00	0	12.00	-	100%	Berdasarkan satuan pendidikan Pesantren yang menerapkan program pendidikan bilingual	https://drive.google.com/drive/folders/1Om4_0UTrG1W1NOubp3vPRqhfeao kts?usp=drive_link
62	Meningkatnya layanan rekognisi pendidikan	Persentase lulusan yang mendapatkan pengakuan atas kualifikasinya oleh lembaga pemerintah, pendidikan umum, atau lembaga profesi	95	0	100	-	105,26%	Berdasarkan data kelulusan santri	https://drive.google.com/drive/folders/1YGgVmCYzmowse-toyRNO9FpZYXAh7uK?usp=drive_link

63	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	80	0	44,53	-	66,66%	Berdasarkan hasil TKA PKPPS	https://drive.google.com/drive/folders/1_pBaUTtkJ-XClcGqfkd8kJve0M0NukXj?usp=drive_link
64		Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	98	0	98	-	100%	Berdasarkan satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	https://docs.google.com/document/d/1aavn6vjrhv-RuHsLRqXQvT7vr_TDah9/edit?usp=sharing&oid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
65		Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	1	0	1	-	100%	Prestasi yang diraih santri	https://drive.google.com/drive/folders/1vU7fTSJuStn2k2bMNFMS7z5gq8CvH9Ev?usp=drive_link
66	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	95	0	95	-	100%	Berdasarkan data pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi	https://docs.google.com/document/d/1SZcoCgzLEiV2o8YID-JPVPeAcTm7iFy4/edit?usp=sharing&oid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
67	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	7	0	7	-	100%	Berdasarkan data guru yang meningkat jenjang karir	https://drive.google.com/file/d/1X3bQA3ak7WgRwlqP8XVLEHnAQst7b4m/view?usp=sharing
68	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Kinerja Anggaran	90	Rp101.050.926.000,00	93,97	Rp94.955.032.125	104,40%	Berdasarkan Laporan Fa Detail	https://drive.google.com/drive/folders/1M9dqjVAwPKYVOW_31-eDRz45ceOePu1?usp=drive_link
69		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan pelaporan PIPK di E-PIPK	https://drive.google.com/file/d/13vhoHj4Jdg8rLpNA-Lj6tbmj5Y3XWC-L/view?usp=sharing
70		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan fasilitas pengaduan masyarakat yang disediakan (barcode, form, dan menu kontak)	https://drive.google.com/file/d/1ArNKGuPotduQMIBpXYVrI9dkD_A0Uv9n/view?usp=sharing
71		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	98	0	80	-	81,63%	Peringkat 8 dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur	https://drive.google.com/drive/folders/1S9ZeN4ja3N921UhY4uUsp_Hud3RvhHVC?usp=sharing

72		Persentase satker yang memperoleh nilai Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko	98	0	100	-	102,04%	Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Zona Integritas	https://drive.google.com/drive/folders/129hvf1IZGWSUhPLNEBFJihwqJK8cJAN?usp=sharing
73		Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan evident capaian kinerja TW4 2025	https://drive.google.com/drive/folders/18w8dFUuzr9BuSGe3KTIPVix0Ptpdr99?usp=sharing
74		Indeks Kepuasan Masyarakat	3,83	0	3,83	-	100%	Berdasarkan Hasil Penilaian Kepuasan Masyarakat	https://drive.google.com/file/d/1MoH-SIXtVHuitpaWt2f92SkGhigAhi_u/view?usp=sharing
75	Meningkatnya kualitas tata kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,1	Rp101.050.926.000,00	93,97	Rp94.955.032.125	102,01%	Berdasarkan Laporan Fa Detail	https://drive.google.com/drive/folders/1M9dqjVAwPKYVOW_31-eDRz45ceOePu1?usp=drive_link
76		Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	99	0	100	-	101%	Berdasarkan tindak lanjut hasil evaluasi dari BPKP	https://drive.google.com/drive/folders/1dmCLrbpHtb-Kb90XQZe44Hq6ZX1y5Rgc?usp=sharing
77		Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	2	0	2	-	100%	Berdasarkan jumlah Laporan dana BOS Madrasah dan BOP RA pada Madrasah/RA	https://drive.google.com/file/d/1fZnQDlumlLevtfVYVJRZ9o3RXVWYdMg/view?usp=sharing
78		Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan data daftar barang ruangan dan RKBMN.	https://drive.google.com/file/d/1BhjO-rssQVbBr-sFPJnvfHHMLNblmp6g/view?usp=sharing
79		Persentase satuan kerja yang menerapkan pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK)	99	0	100	-	101%	Berdasarkan Pelaporan PIPK di E-PIPK	https://drive.google.com/file/d/16SIK4k9YIm7bZ4_qJsh3X0ezaPLgi4d6/view?usp=sharing
80	Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	80	0	100	-	100%	Berdasarkan input proyeksi kebutuhan pegawai	https://drive.google.com/file/d/1m59ZqjLySmbV016DhljGBPlgh34G_V5j/view?usp=sharing
81		Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	20	0	20	-	100%	Berdasarkan data ASN yang memperoleh sertifikat kompetensi	https://drive.google.com/drive/folders/1uYGMpbZ9DxAWTDp7ViPrbL6XPxr0?usp=drive_link

82	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	99	0	99	-	100%	Tidak pernah terjadi kasus hukum tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1opAqdW87XbggjYQO_aukBiowPHWsCoA/view?usp=sharing
83		Persentase rekomendasi izin orang asing	98	0	100	-	100%	Berdasarkan jumlah rekomendasi izin orang asing sampai TW 4 yaitu 1	https://drive.google.com/drive/folders/1bH7HyztUQYxQJwkb64W9Ioh4zyykD7bL?usp=sharing
84	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan persentase arsip digital sampai TW4 2025	https://docs.google.com/document/d/1d6DxwrvRwAEQUJg3C4epO8R37Q3Q-CjE/edit?usp=sharing&oid=115002700366161584146&rtpof=true&sd=true
85		Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan data daftar barang ruangan dan RKBMN.	https://drive.google.com/file/d/1BhjO-rssQVbBr-sFPJnvfHHMLNblmp6g/view?usp=sharing
86	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan Screenshoot WEB PPID Kemenag Kukar	https://drive.google.com/file/d/1LOg9VnVNmGHRQ_1gjHPXciOPsGdYPrYw/view?usp=sharing
87		Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	98	0	100	-	102,04%	Berdasarkan pemberitaan negatif tentang Kemenag yang discounter	https://drive.google.com/drive/folders/1_7X1pvA8VlbDlqWb0J2t079vwhtq_dyq?usp=drive_link
88		Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	20	0	369	-	120%	Berdasarkan peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi tahun 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1-L_s1gPVGkpleDa4Viv8cmWUtGI05vkl?usp=drive_link
TOTAL RERATA CAPAIAN KINERJA			100,74%		TOTAL ANGGARAN			101.050.926.000	
TARGET KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025			100%		TOTAL REALISASI ANGGARAN			94.955.032.125	
CAPAIAN KINERJA SATKER			100,74%		CAPAIAN REALISASI ANGGARAN			93,97%	

26 Februari 2026
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ariyadi F, S.Ag



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA